

G30S Sejarah Yang Digelapkan

Oleh: Harsutejo

Belajar Dari Sejarah Melupakan Masa Lalu?

Sejak tumbangnyanya rezim Jenderal Suharto, lalu diikuti meningkatnya krisis multi dimensi, kita sering diingatkan sejumlah tokoh bahwa yang penting bagi kita menuju dan membangun masa depan, bukan menengok masa lampau. Kita tidak perlu menyalahkan masa lampau, katanya; dengan menyalahkan masa lampau kita tidak akan dapat memperbaiki masa kini dan masa depan, malahan akan membuka luka lama, luka lama sebaiknya dikubur saja, tidak usah diungkit-ungkit lagi, nanti malah menimbulkan masalah baru.

Nampaknya seruan tersebut rasional, masuk akal, bagus, simpatik, demi masa depan bangsa, mudah diterima oleh mereka yang belum cukup memiliki pengalaman dan oleh mereka yang berpikir pendek. Kalau demikian halnya untuk apa kita belajar sejarah, atau belajar dari sejarah? Segala sesuatu, segala eksistensi mempunyai masa lampainya atau sejarahnya, berada dalam kekinian dan mempunyai masa depannya. Masa kini tidak akan dapat dipahami jika tidak mengetahui atau mempelajari masa lampainya. Kita akan berjalan dan menuju ke masa depan tanpa pedoman jika kita tidak mengetahui dan mengerti masa lampau dan yang berakibat masa kini yang sedang kita jalani. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti negeri kita yang telah merdeka lebih dari setengah abad ini dalam keadaan semrawut, acak-acakan, carut-marut seolah tanpa ujung pangkal untuk dapat mengatasinya. Sementara negeri serumpun Malaysia sudah lebih makmur dan teratur, Vietnam yang hancur lebur oleh bom dan tank Amerika itu sudah menyusul di depan kita dalam banyak hal, apalagi sang raksasa Cina, dengan segala kekurangan mereka masing-masing.

Seruan yang nampak simpatik tersebut di atas mengandung bahaya serius, selubung untuk maksud tertentu. Kalau diterima artinya pelanggaran dan kejahatan HAM masa lampau, korupsi masa lampau yang sudah menumpuk kekayaan bergunung-gunung yang membuat bangsa Indonesia nyaris bangkrut, tidak perlu diusut dan diungkit kembali, sudah menjadi sejarah. Seluruh rakyat tertindas dan yang pernah dizalimi, semua mereka yang sadar tidak akan menerima seruan menyesatkan itu.

Masa Lampau Indonesia

Ketidakadilan ekonomi secara telanjang didemonstrasikan oleh persetujuan KMB antara pemerintah RI dengan Belanda yang diteken oleh Hatta pada 1949. RI harus menanggung utang pemerintah jajahan Hindia Belanda sebesar US\$1,13 miliar, suatu beban luar biasa bagi negeri muda ini. Utang itu di antaranya sudah berasal dari 1896, dengan kata lain utang untuk menindas dan menghisap rakyat

Indonesia yang harus dibayar kembali oleh rakyat. Demikianlah republik memulai kehidupan ekonominya dengan beban berat. Berbagai pemberontakan bersenjata terus merongrong RI sampai menjelang 1960, pada umumnya menyangkut kekuatan asing di antaranya dari Amerika dengan CIA nya yang tersohor itu.

Melalui tragedi G30S 1965 yang penuh kegelapan dan penggelapan itu Jenderal Suharto melakukan kudeta merangkak terhadap pemerintahan Presiden Sukarno dengan bersimbah darah jutaan rakyat, di samping nyawa 6 jenderal. Segala cita-cita rakyat yang tercermin dalam ajaran Trisakti BK, bebas dalam politik, berdikari dalam perekonomian, dan berkepribadian dalam kebudayaan dijungkirbalikkan. Militerisme, khususnya dari AD, telah menjadi tulang punggung kekuasaan yang mendominasi seluruh aspek kehidupan bangsa. Negeri dibangun dengan utang luar negeri, membesarkan para konglomerat yang menjadi kroni kekuasaan militer, sedang rakyat hanya menjadi objeknya. Pembangunan hanya mengacu pada sistim kapitalisme neo-liberal tanpa mengacu kepentingan rakyat banyak. Dalam apa yang disebut sebagai pembangunan, pelanggaran HAM dihalalkan. Para birokrat bersatupadu dengan penguasa militer serta konglomerat yang juga ditopang selapisan elite cendekiawan dengan mesin politik Golkar, melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap negeri ini di sepanjang kekuasaan rezim militer Orba Suharto beserta segala macam penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang sudah menjadi bagian esensialnya. Pada puncaknya mereka nyaris membuat bangsa ini menuju jurang kebangkrutan.

Para penguasa dan pengusaha hitam ini telah mengakumulasi kekayaan negeri ini luar biasa besarnya, paling tidak puluhan miliar dollar Amerika hingga dana mereka akan tetap dapat mempengaruhi situasi Indonesia masa kini maupun masa depan yang panjang. Berapa miliar dollar kekayaan seluruhnya berakumulasi di tangan mereka, tidak mudah diketahui. Kekayaan dari penjarahan itu terlindungi dengan aman dalam sistim ekonomi dan perbankan nasional maupun internasional sampai saat ini!

Masa Kini, Masa Depan Indonesia dan KKR

Dewasa ini kita telah mewarisi negeri dengan situasi yang amat pelik, kerusakan negeri tercinta ini telah dilakukan oleh rezim militer Orba selama 32 tahun dan yang masih berlanjut sampai saat ini. Pembangunan fisik yang telah dilakukannya tidaklah banyak artinya dengan kerusakan fisik negeri ini maupun kerusakan moral manusia yang dibuat oleh pembangunan model Orba. Pertama-tama rezim militer Orba telah merusak sendi-sendi warisan para Bapak Bangsa berupa kontrak bernegara dan berbangsa yang dirumuskan dalam Pancasila dengan semboyan dasarnya Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa bangsa Indonesia telah bersetuju untuk menerima segala macam perbedaan serta menghormatinya; berbeda suku dan asal keturunan, bahasa daerah, pulau, agama, kepercayaan, ideologi, warna kulit, sejarah, dan bermacam perbedaan yang lain dengan tiga pilar persamaan yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.

Rezim militer Orba telah mendiskriminasi jutaan warga negaranya beserta anak cucu dan sanak kadangnya dalam golongan paria yang dirampas hak sipil mereka dan yang belum pernah dipulihkan kembali, kepada apa yang disebut mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung G30S/PKI 1965, apa yang disebut mereka yang tidak “bersih diri” dan tidak “bersih lingkungan”. Kenyataan ini telah memecahbelah rakyat Indonesia secara ganas dan getir, untuk memulihkannya diperlukan waktu panjang. Sebelum seluruh hak sipil para korban dan anak cucunya dipulihkan kembali, itu berarti diskriminasi masih berlaku terus.

Adanya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), baru merupakan langkah pertama ke arah penyingkapan kebenaran sejarah masa lampau serta pemulihan hak sipil dan nama baik korban segala pelanggaran HAM. Langkah pertama ini akan menjadi penting artinya jika tercantum pasal-pasal yang memberikan ruang terhadap penyingkapan kebenaran itu serta rehabilitasi yang kemudian diikuti dengan kompensasi yang masuk akal. Pertanda buruk dapat kita lihat ketika Wakil Ketua Pansus RUU KKR, Sofwan Chudorie, memberikan contoh masalah yang akan ditangani dengan menyebut kasus PRRI/Permesta, DI/TII sampai Tangjungpriok dan ninja Banyuwangi (*Kompas*, 21-8-2004:7). Ia sama sekali tidak menyebut kasus terbesar dan paling dahsyat yakni G30S yang telah memakan 3 juta korban pembantaian serta berjuta-juta korban yang masih hidup termasuk ratusan atau ribuan orang yang tetap terdampar di luar negeri. Masih takutkah para wakil rakyat ini hanya untuk menyebutnya saja? Dengan demikian jelas masih diperlukan perjalanan panjang. Apalagi pernah terdapat usulan menghilangkan kata ‘kebenaran’ dalam RUU tersebut yang tidak berhasil. Yang lebih hakiki lagi bagaimana undang-undang itu memaknai kata ‘kebenaran’, jika hanya kebenaran yuridis semata tidak akan ada gunanya bagi rekonsiliasi yang sebenarnya. Hari depan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian kasus besar ini.

Bekasi, 2 September 2004.

G30S

Rekayasa dan Monopoli Kebenaran Rezim Orba

Oleh: Harsutejo

Fitnah Lebih Kejam Dari Pembunuhan

Kalau kita simak sejak pidato Jenderal Suharto di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965 tentang penyiksaan para jenderal serta keterlibatan AURI karena hal itu menurutnya terjadi dalam wilayah yurisdiksi AURI, maka berdirinya rezim Orde Baru dimulai dengan propaganda kebohongan dan fitnah. Hal demikian berjalan terus sepanjang kekuasaan rezim ini yang selalu ditopang dengan rekayasa dan disudahi dengan kekerasan berdarah. Karena seluruh media massa

dimonopolinya, termasuk mengerahkan para pakar di bidangnya masing-masing, maka kebenaran menjadi monopolinya, termasuk tafsir sejarah.

Kita ambil contoh ekstrim tentang “ditemukannya” apa yang mereka sebut sebagai “alat pencungkil mata” para jenderal yang menjadi korban, sebagai yang ditulis koran dibawah asuhan Jenderal Nasution *Api Pancasila* pada 20 Oktober 1965. Alat itu konon ditemukan oleh para pemuda anti komunis yang menggerebek kantor PKI di desa Harupanggung di Garut (Anderson 1999:45). Berita ini merupakan suatu contoh rekayasa yang dilakukan dengan cukup kreatif karena langka, tetapi sekaligus bebal. Betapa tidak, orang yang mampu berpikir akan bertanya seberapa besar dan pentingnya alat itu hingga harus disembunyikan sampai ke daerah Garut dari Lubang Buaya. Apa keistimewaan tempat itu hingga dipilih menjadi tempat penyimpanan barang langka tersebut. Barangkali sang konseptor mengira rakyat Indonesia ini begitu bodoh hingga gampang dikelabui dengan cara serampangan semacam itu.

Cara-cara fitnah yang lain, setelah penggerebekan kantor-kantor PKI dan organisasi kiri, atau rumah-rumah pimpinan PKI maka disebut ditemukan daftar hitam yang telah dipersiapkan oleh PKI, yakni daftar lawan-lawan politiknya yang hendak dihabiskannya. Tidak selembat daftar pun yang dapat diajukan ke suatu pengadilan yang mana saja di seluruh Indonesia seputar G30S. Sering berita demikian dilengkapi dan diramaikan dengan apa yang mereka sebut sebagai penemuan sumur-sumur semacam Lubang Buaya (Lihat Nasution 6 1988:193-194). Jenderal Nasution pun ikut serta dalam orkestra fitnah tersebut, ketika ucapannya bahwa fitnah lebih jahat dari pembunuhan, begitu populernya dan masih terngiang di telinga banyak orang (Nasution 6 1988:284). Daftar hitam memang pernah ada seperti diakui agen CIA kepada wartawan AS Kathy Kadane, yakni daftar kader PKI yang dibuat oleh CIA dan diserahkan kepada Jenderal Suharto lewat Tirta Kencana (Kim) Adyatman, ajudan Adam Malik, untuk dibantai dan dihabiskan.

Prof Dr Nugroho Notosusanto

Seperti kita ketahui setelah terbitnya buku *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia – Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* (susunan Setneg RI pada 1994), maka buku ini menjadi babon untuk segala buku sejarah G30S lain, buku-buku pelajaran sekolah dan umum. Sebelum itu telah terbit buku babon pemula sudah pada tahun 1967 yang aslinya dalam bahasa Inggris, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Bagian pertama ditulis oleh Prof Dr Nugroho Notosusanto, bagian kedua oleh Ismail Saleh. Di sepanjang kekuasaan rezim Orde Baru, buku ini telah memonopoli kebenaran selama 30 tahun. Dasar-dasar buku tersebut ditampung dalam buku babon *Sejarah Nasional Indonesia VI* yang diterbitkan oleh Depdikbud.

Prof Dr Nugroho, yang pernah memperdalam Metode dan Filsafat Sejarah di University of London, doktor Ilmu Sastra Bidang Sejarah (Nugroho Notosusanto 1994:239), telah menulis dalam kisah pendahuluan bukunya bahwa PKI dari partai kecil telah tumbuh menjadi sebuah partai massa yang hebat sebelum Oktober 1965.

Disebutkan bahwa wakil-wakil partai itu duduk di Kabinet, DPR dan MPR. (1994:3). Dalam kata pendahuluannya disebutkan, "... hasil-hasil sidang mahkamah Militer Luar Biasa, yang mengadili para pelaku percobaan kup dijadikan sumber utama dalam penulisan buku ini"(1994:xiv), sama dengan buku babon yang sebenarnya *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, terbitan Sekretariat Negara RI pada 1994 dengan pengantar Menteri Sekretaris Negara Murdiono, "Sebagian besar materinya bersumber dari fakta yang terungkap dalam sidang-sidang pengadilan terhadap tokoh-tokoh PKI dan mereka yang terlibat dalam pemberontakan oleh Gerakan 30 September" (1994:viii). Dalam hal ini sang sejarawan telah menyembunyikan fakta sejarah bahwa PKI merupakan partai terbesar ke empat sebagai hasil pemilu 1955 yang dinilai demokratis setelah PNI, Masyumi, dan NU.^{i[1]}

Ketika itu PKI mempunyai tiga orang wakilnya di kabinet yakni Nyoto sebagai Menteri Negara, selanjutnya Aidit sebagai Menko Wakil Ketua MPRS, dan Lukman sebagai Menteri Wakil Ketua DPR. Posisi mereka tak banyak artinya dalam seluruh konstelasi kabinet dibanding sejumlah menteri dari AD meskipun mungkin suara mereka cukup diperhatikan oleh Bung Karno. Selanjutnya sejarawan Nugroho menulis, "Semua itu dicapai **berkat pimpinan licik** [huruf tebal hs] dari DN Aidit, yang menjadi ketua partai pada tahun 1951. Bukan melalui cara bersekongkol, sembunyi-sembunyi, atau bergerak di bawah tanah, melainkan jalan parlementerlah yang dipilih Aidit untuk meraih kekuasaan." (1994:3)

'Berkat pimpinan licik'..., berulang kali saya baca kalimat tersebut di atas ketika menyusun tulisan ini, saya khawatir saya salah baca. Tetapi saya tidak salah baca, para pembaca dapat memeriksanya. Saya hanya dapat menemukan satu hubungan yakni 'pimpinan licik' dan 'jalan parlementer'. Cuma di mana letak logika hubungannya? Jangan-jangan yang dimaksudkannya 'pimpinan licik' itu dengan 'cara bersekongkol, sembunyi-sembunyi, atau bergerak di bawah tanah', ini baru terdapat logika. Tapi ia mengatakannya bukan bersekongkol, bukan sembunyi-sembunyi, bukan di bawah tanah, tetapi 'jalan parlementer'. Saya kehabisan logika bahasa, adakah harus disikapi dari ilmu filsafat sejarah. Agaknya kita akan memasuki wilayah terlalu akademis, sedang masalahnya jauh lebih sederhana. Maka sampailah pada kesimpulan, hal itu ditulis karena kebencian sang sejarawan yang tak tertahankan terhadap objek sejarah yang sedang dituliskannya. Dapat kita bayangkan analisis macam apa yang dihasilkan seorang sejarawan terhadap objek sejarah yang disikapi semacam itu.

Nugroho selanjutnya menulis, "**Faktor tunggal terpenting** [huruf tebal hs] yang menyebabkan Aidit mencapai sukses, adalah persahabatannya dengan Presiden Soekarno, yang diperkokoh selama masa Demokrasi Terpimpin. Dengan pengaruh karismaniknya yang luar biasa terhadap seluruh bangsa, Presiden Soekarno memberikan perlindungan kepada PKI dalam menghadapi musuh-musuhnya" (1994:3). Di situ disebut 'faktor tunggal terpenting', betapa sederhananya. Karena ketuanya bersahabat dengan presiden dan partainya dilindungi, dan ini disebutnya sebagai 'faktor tunggal terpenting' maka PKI keluar sebagai partai besar ke empat. Inilah analisis sejarawan kita! Tokoh yang pernah

menjabat sebagai Kepala Sejarah ABRI, pengajar SESKO ABRI, pengajar pada Lemhanas, Rektor UI, dan Menteri PDK. Apa boleh buat berpuluh tahun lamanya para murid dan guru sejarah, bahkan seluruh bangsa ini mendapatkan ajaran sejarah dari sang empu ini sebagai kebenaran tunggalnya, bahkan setelah beliau almarhum.

Karena Nugroho menyebut ‘faktor tunggal’, artinya tidak ada faktor lain lagi, atau barangkali yang lebih tepat tidak ada faktor lain yang patut diperhitungkan. Tapi ia menyebut ‘faktor tunggal terpenting’, barangkali ada faktor tunggal lain yang kurang penting. Meski kalimat di atas ditulis dalam bahasa Indonesia yang sederhana, tapi cukup sulit untuk ditangkap maksud sebenarnya. Sejarawan Brigjen Prof Dr Nugroho kita kenal juga sebagai sastrawan, sarjana sastra, pernah menjadi Rektor UI dan Mendikbud, pasti menguasai bahasa Indonesia dengan amat baik. Bagaimana bisa dalam empat kalimat yang padat dan sederhana itu sulit dicari logika bahasanya! Adakah hal itu hanya sekedar masalah semantik semata? Agaknya masalahnya dapat dikembalikan pada soal kebenciannya yang tak tertahankan pada objek sejarah yang ditulisnya seperti disebut di atas, pada kepentingan pribadi dan golongan berkuasa yang diwakilinya dengan praktek segala cara dihalalkan, atau mungkin ada yang bisa menjelaskannya yang lain.

Selanjutnya disebutkan bahwa pada 1 Oktober 1965 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma berkumpul beberapa kelompok pemberontak. Yang pertama kelompok Cenko [(c)entral komando]; kedua Presiden beserta pengikutnya yang berada di rumah Komodor Susanto; yang ketiga Aidit beserta pembantunya di rumah Sertu Udara Suwardi (1994:31). Coba kita perhatikan, Prof Dr Nugroho menggolongkan Presiden Sukarno beserta Waperdam Leimena, Men/Pangak Sucipto, Men/Pangal Martadinata (yang kemudian meninggalkan Halim), dan Men/Pangau Omar Dani beserta pembantu-pembantunya ke dalam satu kelompok pemberontak! Bayangkan, Presiden Sukarno memberontak terhadap sesuatu kekuasaan tentunya, entah kekuasaan resmi yang mana yang sedang ia lawan. Entah logika yang mana yang digunakan oleh sang profesor, sulit untuk diraba, sepertinya logika serampangan tanpa dasar yang bernalar. Agaknya cukup tepat jika sang profesor disebut sebagai koruptor sejarah (Scott 2000:xiv pengantar oleh Waluyo Subagyo Kartanegara).

Rupanya visi pendek Prof Dr Nugroho Notosusanto terhadap hari depan Indonesia telah membuatnya lupa bahwa tulisannya itu dapat dikaji ulang tanpa sandaran dan topangan kekuatan kekuasaan yang sedang berada di atas angin baginya. Kalau intelektual itu diukur dari kemampuannya berjarak dengan segala sesuatu, terbuka terus- menerus dalam mempertanyakan segalanya tanpa ikatan interes apa pun kecuali pikiran kritis untuk kebenaran dan kemanusiaan, maka ia tergolong intelektual kekuasaan, orang yang memiliki daya intelektual hanya untuk menjual dirinya mengabdikan kekuasaan.

Buku Putih Setneg

Buku Putih keluaran Setneg Orde Baru tersebut di atas mulai dari pembukaannya telah menggiring pembaca untuk menelusuri jejak PKI sejak berdirinya, melalui pemberontakan 1926, 1948 dan 1965. Buku Putih dengan cermat menggunakan kata 'mencetuskan pergolakan' untuk tahun 1926/1927, sedang untuk tahun 1948 dan 1965 'pemberontakan'. Pendeknya ada benang merah yang diperlihatkan dalam sejarah kekerasan yang dilakukan PKI, tanpa membedakan bahwa pemberontakan tahun 1926/1927 merupakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Jadi pembaca digiring untuk mendapatkan persepsi bahwa PKI memang tukang berontak, jadi wajar saja jika pada tahun 1965 juga melakukan pemberontakan lagi. Karena itu PKI harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya agar di Indonesia tak pernah terjadi pemberontakan lagi. Seperti kita ketahui sampai saat ini pun peristiwa Madiun pada 1948 masih mengandung persoalan yang buram akan kejadian yang sesungguhnya.

Buku Putih secara sistematik menceritakan sejarah PKI sejak berdirinya, kemudian diikuti dengan rentetan rapat-rapat Politbiro CC PKI serta rapat-rapat Letkol Untung cs dengan Syam cs beserta isi pembicaraannya. Karena semuanya itu dituliskan dalam konteks meletusnya G30S, maka pembaca, bahkan sejarah, telah dikondisikan untuk menyimpulkan bahwa semua rapat Politbiro PKI itu dalam rangka mempersiapkan G30S, maka jadilah G30S/PKI. Buku putih telah mengkondisikan sejarah untuk hanya menjurus pada satu titik bahwa PKI adalah dalang G30S. Mari kita tengok apa yang terjadi di Kostrad pada pagi hari 1 Oktober 1965. "Begitu G30S meletus, ... Pak Yoga tegas, ini PKI. 'Siapkan semua penjagaan, senjata, bongkar gudang. Ini PKI berontak.'"... Pak Yoga menyiapkan segalanya, termasuk *matur* Pak Harto... maka kita kumpul lagi di ruang Pak Harto. Di sini kita tentukan lagi nasib bangsa selanjutnya" (Yoga Sugomo 1990:37 catatan Ali Murtopo) sebelum orang lain mengetahui apa pun. "Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI... Mereka mengadakan gerakan kup untuk merebut kekuasaan negara secara paksa. Dan pasti didalangi PKI" (Soeharto 1989:119,121). Memastikan sesuatu dengan firasat (Suharto), dengan *feeling* intelijen (Yoga Sugomo). Ataukah mereka yang membuat skenarionya, setidaknya mereka berdua ikut serta dalam penyusunan skenario itu?

Apa Kepentingan Suharto Membungkam Aidit?

PKI ketika itu merupakan satu dari empat partai politik besar, tidak mengherankan kalau partai ini pun mempunyai kepentingan terhadap segala macam perkembangan keadaan seperti halnya PNI, NU, Masyumi. Meskipun Masyumi dan PSI ketika itu sudah dibubarkan, keduanya masih berpengaruh terhadap perpolitikan Indonesia. Kalau mau adil untuk kepentingan sejarah maka buku sejarah itu juga harus membeberkan semua pertemuan dan pembicaraan serta dokumen partai-partai tersebut. Masih ada lagi penentu perpolitikan Indonesia di samping pemerintah dalam bentuknya Presiden beserta dengan kabinetnya, yang amat penting adalah juga AD beserta badan intelijennya termasuk Kostrad. Coba beberkan semua dokumen yang relevan, termasuk dokumen-dokumen rahasia, jejerkan dengan dokumen CIA, KGB dan negara lain

dari masa era perang dingin. Karena yang diungkapkan Buku Putih cuma PKI dengan cara menggiringnya pada konsep yang telah diletakkan, lalu ditariklah kesimpulan tunggal sebagai kebenaran sejarah satu-satunya tanpa alternatif lain. Tentu saja buku tersebut tidak akan mempertanyakan apa yang dibicarakan Kolonel Latief dengan Mayjen Suharto di rumah sakit Gatot Subroto empat jam sebelum penculikan dan pembunuhan Jenderal Yani cs. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Jenderal Suharto dengan Letkol Untung dan Kolonel Latief, dua gembong G30S? Bahkan juga dengan Syam Kamaruzaman, konon sang spion agen kepala banyak yang penuh misteri itu?

Dalam seluruh kontroversi tragedi ini agaknya orang bersetuju bahwa Aidit tersangkut dengan peristiwa tersebut. Sampai seberapa jauh keterlibatannya sehubungan dengan Biro Khusus yang diketuai Syam telah terkubur bersamanya. Apa sebab ia tidak dibawa ke pengadilan, kenapa Suharto menghendaki ia segera dibungkam untuk selamanya? Pasti Suharto memiliki kepentingan amat besar agar Aidit tidak membuka mulut di pengadilan. Mungkinkah ada *deal* antara Suharto dengan Aidit? Buku Putih menahbiskan Aidit sebagai dalang utama. Dalam kenyataannya ia tidak pernah memegang wayang-wayangnya, ada dalang-dalang yang tanpa diketahui olehnya serta merta menyerimpung Aidit tanpa berkutik dan melemparkannya ke lubang bawah tanah. Aidit adalah salah satu aktor tragis yang tidak pernah sempat bermain menunjukkan kebolehannya sejak tanggal 30 September 1965 sampai ia ditembak mati oleh wayang dari dalang yang sebenarnya pada 22 November 1965. Pelaku pinggiran ini telah dinobatkan sebagai aktor utama atau dalang utama, ini soal semantik saja, oleh Buku Putih karena buku ini telah mengkondisikan sejarah PKI dan tokoh ini menuju G30S dengan skenario lengkap (Bahan dari Harsutejo, *G30S Sejarah Yang Digelapkan*, Hasta Mitra, Jakarta, 2003).

^[1] Lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, KPG, Jakarta, 1999.

G30S dan Tragedi Aidit

Oleh: Harsutejo

Aidit Diculik?

Isteri Aidit mengatakan kepada pejabat AD bahwa suaminya pada 30 September 1965 diculik oleh sejumlah tentara. Demikian berita AFP 7 Oktober 1965 yang dikutip Anderson & McVey (2001:122) Hal ini rupanya sesuai dengan surat Aidit kepada Presiden Sukarno tertanggal 6 Oktober 1965. "Tanggal 30 September tengah malam saya diambil oleh seorang yang berpakaian Cakrabirawa (tidak saya kenal) dengan keterangan dipanggil ke Istana untuk sidang darurat kabinet, tapi kendaraan tersebut menuju ke jurusan Jatinegara. Kemudian pindah

mobil terus menuju ke sebuah kampung dan ditempatkan di sebuah rumah kecil. Di situ saya diberitahu bahwa akan diadakan penangkapan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal” (Soegiarso Soerojo 1988:232). Akhirnya ia dibawa ke rumah Sersan Udara Suwardi di Pangkalan Halim oleh Mayor Udara Suyono. Perkembangan dan fakta kemudian menunjukkan bahwa ia sama sekali bukan diculik, ia pergi ke Pangkalan Halim sesuai dengan suatu rencana yang diketahuinya. Kenyataan menunjukkan bahwa ia juga bukan pemimpin kudeta atau pemberontakan. Dalam kenyataannya segala sesuatu ditentukan oleh orang yang bernama Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus. Aidit hanya berhubungan dengan Cenko I di Penas melalui Syam. Dengan demikian Aidit telah diisolasi dari segala macam informasi, semata-mata tergantung pada Syam yang telah memonopoli dan memanipulasinya. Ia tidak dapat berhubungan dengan anggota Politbiro maupun pejabat negara yang lain. Selama di Halim Aidit ditemani oleh dua orang pengawalnya, agaknya bagai pesakitan yang dijaga oleh dua orang polisi untuk dipastikan bahwa ia sepenuhnya terisolasi. Posisi Aidit yang tersandera oleh pengikutnya sendiri (yang mungkin sudah menjadi alat intelijen lawan), agaknya hal ini terulang dengan nasib mantan Presiden Irak Saddam Hussein sebagai yang disinyalir oleh dinas intelijen Israel pertengahan Desember 2003 (Dekatik Special Report 14 Dec.2003).

Aidit Berada “Dalam Kantong”

Terbangnya Aidit ke Jawa Tengah menurut Syam atas permintaannya. Brigjen Suparjo lah yang meminta bantuan pesawat kepada pejabat PAU Halim untuk seorang pejabat negara Menko Wakil Ketua MPRS (Omar Dani 2001:89-90). Ketika sudah ada di dekat pesawat Aidit nampak ragu-ragu, seperti yang dituturkan oleh Kusno, pengawalnya, kemudian Syam mendekatinya dan memintanya agar segera naik (Siregar 1995:158). Sesampai di Yogya, salah satu kota basis PKI, tak seorang pun menjemputnya. Sebagai layaknya seorang pejabat negara maka Aidit beserta dua pengawalnya diantarkan ke kota seperti permintaannya oleh pejabat PAU Yogya. Beberapa kali pengawal Aidit mendatangi alamat yang salah, pertama rumah seorang pengurus NU, kemudian rumah pengurus PNI (Omar Dani 2001:89-90). Betapa ceroboh dalam keadaan kritis semacam itu, tetapi mungkin saja ini justru upaya untuk menegaskan bahwa Aidit “sudah berada dalam kantong”. Pantaskah Aidit yang terus-menerus dipencilkan itu digelari pemimpin kudeta seperti ditulis Prof Nugroho? (Nugroho Notosusanto 1993:9). Beberapa waktu kemudian Aidit naik bus ke Sala, kemudian melanjutkan ke sebuah desa dengan sepeda, lalu kembali lagi ke Sala (Tornquist 1984:326). Ia sempat mengadakan pertemuan dengan MH Lukman dan Ir Sakirman di Semarang, bersama Lukman kemudian ia balik ke Sala. Serangkaian pertemuan kemudian diadakan di Sala (Nugroho Notosusanto 1993:49). Berdasar keterangan sopir MH Lukman, mereka berkeliling menghubungi cabang-cabang PKI untuk memberi informasi tentang apa yang sedang terjadi, diminta untuk waspada dan jangan sampai terkena provokasi (Anderson 1996:11).ⁱⁱⁱ Selanjutnya Aidit dalam keadaan kian terpencil.

Berdasar keterangan beberapa aktivis yang menjumpainya selama pelarian, Aidit mempunyai rencana untuk meminta pertolongan Presiden Sukarno untuk melakukan penyelesaian politik terhadap tragedi yang telah terjadi (Budiardjo 1997:53). Nasib dan masa depan PKI berada di tangan Sukarno (Brackman 2000:125). Rupanya Aidit sudah sampai pada akhir terowongan jalan buntu dan putusasa. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa ia bersandar pada figur Sukarno, suatu ilusi borjuis kecil dan oportuniste kanan yang parah berdasar terminologi komunis. Seperti disebut dalam kritik tajam Sudisman bahwa ketika nasib partai dan gerakan revolusioner diserahkan pada kebijakan Presiden Sukarno, hal itu merupakan puncak kelemahan dan kesalahan berat PKI di bidang ideologi, politik, dan organisasi (Sudisman-KOK 2000:82).

Di kancah internasional dalam hubungannya dengan pertentangan yang kian menajam antara dua partai komunis Soviet dan Tiongkok, Aidit telah mengambil posisi independen yang berhasil. Anehnya bersamaan dengan itu di dalam negeri ia menggantungkan diri pada figur Presiden Sukarno (Dake 2001:455). Dalam hubungan ini menarik untuk membandingkan dengan ulasan Hasan Raid, seorang mantan aktivis PKI yang cukup dikenal. Dalam surat Aidit kepada Presiden Sukarno seperti tersebut di atas, ia mendesak BK untuk segera menghentikan teror yang sedang berlangsung, jika tidak dengan nada mengancam ia menyatakan, "Kami akan menempuh jalan sendiri". Menurut Hasan Raid hal itu membuktikan bahwa selama ini Aidit tidak menempuh jalannya sendiri, jalan PKI, tetapi menempuh jalan orang lain. Itu berarti secara sukarela Aidit telah memberikan sejumlah konsesi teori (*Soeara Kita* November 2001:5). Selanjutnya Hasan Raid menulis,

"Karena kegandrungan Aidit begitu dalam pada Bung Karno, mudah dimengerti bila ia mudah pula terperangkap untuk mendukung suatu gerakan yang seakan guna menyelamatkan kedudukan Presiden Sukarno dari ancaman pihak lain, padahal sesungguhnya gerakan itu justru untuk menggulingkan kekuasaan Sukarno dengan memakai kedok seolah-olah untuk menyelamatkan Bung Karno. Dan itulah yang terjadi dengan terlibatnya Aidit dalam G30S" (*Soeara Kita* November 2001:5).

Perang Intelijen

Konon kemudian ia dikhianati seorang pengawalnya (Tornquist 1984:236). Sebenarnya ia tidak dikhianati pengawalnya yang bernama Sriharto Harjomiguno. Beberapa tahun sebelumnya pengawal ini tamat dari sekolah intelijen AD di Bogor. Ia bekerja di sebuah perusahaan di Karanganyar, Sala, menjadi pengurus serikat buruh dan Partindo, lalu masuk PKI bawah tanah. Ketika Aidit berada di daerah Sala permulaan Oktober 1965, Sriharto ditunjuk oleh Biro Khusus menjadi salah satu pengawalnya. Aidit pernah diinapkan di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Sriharto melapor kepada Kolonel Yasir Hadibroto di Sala bahwa ia petugas intel yang langsung mendapat perintah dari KSAB (Kepala Staf Angkatan Bersenjata) Jenderal Nasution, merencanakan penangkapan Aidit

yang akan dilakukan pada permulaan November 1965. Kolonel Yasir memerlukan menelitinya dengan cermat, memeriksa surat penugasannya, lalu menemui Jenderal Nasution untuk melakukan konfirmasi. Dengan bimbingan intel AD Sriharto yang sekaligus petugas Biro Khusus sebagai pengawal Aidit, maka pesakitan rezim Orde Baru ini dengan mudah ditangkap oleh pasukan Kolonel Yasir di desa Sambeng, pinggiran kota Sala (Nasution 6 1988:322).

Amat menarik bahwa dalam sebuah telegram laporan rahasia Dubes AS Marshall Green tertanggal 18 Oktober 1965 nomor 1055 kepada William Bundy, Pembantu Menlu Urusan Asia Timur dan Pasifik, antara lain dicatat pertemuan antara Kolonel William Ethel, Atase Militer Kedubes AS dengan utusan Jenderal Nasution. Antara lain disebutkan bahwa Aidit telah ditangkap di Jawa Tengah. Hal itu tidak diumumkan agar PKI tidak menunjuk seorang ketua partai yang baru. Karena pentingnya persoalan ini maka telegram dikopi untuk dikirim ke Manila, Pentagon dan Presiden Johnson (CIA 2001:327).^{i [iii]} Hal ini sesuai dengan keberhasilan Sriharto, petugas intel Jenderal Nasution tersebut di atas yang telah mengantongi Aidit di sakunya untuk dijerat pada saat yang tepat. Bahkan sebenarnya sejak 30 September 1965, Aidit sudah berada dalam bubu yang dicengkeram oleh Syam.

Betapa parah badan intelijen PKI yang bernama Biro Khusus ini, dapat ditengarai antara lain dengan kasus penangkapan Aidit tersebut. Seorang intel militer yang bertahun-tahun mendapat perintah langsung dari KSAB seperti Sriharto tersebut dapat ditugaskan oleh Biro Khusus untuk mengawal Sang Ketua. Pihak AD yang jauh lebih berpengalaman itu telah memenangkan perang intelijen sejak mula. Biro Khusus hanyalah badan intelijen primitif amatiran yang tidak terlatih ditinjau dari kepentingan PKI, sepenuhnya berada di tangan Syam dengan infiltrasi intelijen AD yang sangat jauh. Dapat dibilang yang bernama Biro Khusus ini sekedar kepanjangan tangan dinas intelijen AD dari Kodam Jaya atau dan Kostrad. Dalam hal ini Aidit telah berhasil dimanipulasi oleh Syam dan berada di genggamannya. Syam telah membangun partai dalam partai sebagai halnya AD membangun negara dalam negara, untuk mencari dan mengidentifikasi para perwira dan anggota militer simpatisan PKI dan BK untuk dibasminya pada saat yang tepat (Siregar 1995:181). Kenyataannya para perwira pelaku G30S, terutama dari AD mengejar jadwal politik mereka sendiri dalam pertentangan internal mereka (Carmel Budiardjo 1997:52).

Jalannya peristiwa menunjukkan bahwa Aidit sama sekali bukan pengendali, ia sekedar seorang jenderal partai yang masuk arena yang hampir tidak dikenalnya seorang diri. Kalau di bidang politik ia bersandar pada Presiden Sukarno, maka di bidang lain, dalam hal ini intelijen dan kemiliteran sepenuhnya ia bersandar pada seorang Syam, tak seorang lain pun yang mempunyai peluang untuk memberikan evaluasinya secara independen. Arena itu ternyata berupa perangkap jebakan yang telah lama dipasang dengan sabar, hati-hati dan cermat oleh lawan-lawannya yang ternyata lebih ulet, sabar, berpengalaman dan licin. Dan pada saat yang tepat jebakan itu membungkam dan mencengkeram dirinya tanpa ampun, memporakporandakan segala macam teori perjuangan Aidit. Dan berakhirilah segala macam ambisi sang tokoh. Dunia pun terkesimak, partai

komunis terbesar di luar Soviet dan Cina itu hancur hanya dalam hitungan bulan dalam lumuran darah rakyat Indonesia. Ratusan ribu kaum komunis dan simpatisannya tersihir bengong dan memberikan lehernya untuk digorok, mereka tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi keadaan semacam itu. Apalagi dengan keberhasilan strategi Aidit yang selama itu diterima luas hampir tanpa perlawanan internal, telah menciptakan kondisi "...bahwa partai bisa terjatuh dalam periode bawah tanah telah jauh dari pikiran orang [para aktivis dan anggota]. Dalam keadaan demikian, para aktivis tidak siap menghadapi tekanan-tekanan fisik maupun psikis yang dilakukan terhadap mereka oleh para interogator dan penyiksa dari Angkatan Darat. Kebanyakan kolaborator datang dari jajaran aktivis senior PKI atau organisasi-organisasi sayap kiri." Demikian tulis Carmel Budiardjo berdasarkan pengalaman langsung pengamatannya sebagai mantan tapol (C Budiardjo 1997:44).

Beberapa tahun sebelumnya, di depan sidang DPR RI pada 11 Februari 1957, Aidit menyatakan, "...sudah menjadi pelajaran di dalam sekolah-sekolah, kursus-kursus partai kami, kami ingin dan kami yakin bisa mencapai tujuan-tujuan politik kami secara parlementer.... Tetapi, kalau kepada kami disodorkan bayonet dan desingan peluru seperti dalam peristiwa Madiun... kami tidak akan memberikan dada kami untuk ditembus bayonet dan ditembus peluru..." (Pustaka Pena 2001:204). Janji Aidit tidak terbukti. Jutaan rakyat menjadi korban tanpa tahu *po bengkong* atawa ujung pangkalnya dan seperti menyerahkan diri sepenuhnya, *pasrah bongkokan*. Jelas bahwa perkiraan resiko kecil itu telah menjadi ilusi politik yang parah dan fatal yang menjebloskan Aidit dan kawan-kawannya serta ratusan ribu atau jutaan rakyat yang tidak tahu menahu ke ladang pembantaian berdarah pihak militer kanan. Ini bukan sekedar tragedi Aidit seorang atau tragedi PKI, bahkan tragedi bangsa. Kenyataan tersebut memberikan kesan dan tafsiran bahwa organisasi kiri yang sering didengungkan sebagai terkuat dan paling disiplin itu ternyata cuma macam ompong belaka. "PKI yang diorganisasi lebih untuk beragitasi daripada berperang, sama sekali tidak berada dalam posisi untuk membela diri terhadap serangan yang didukung oleh AD. Para pemimpinnya bersikap ragu untuk mendorong mengadakan perlawanan, sedang kawan-kawan mereka dalam angkatan bersenjata terlalu kecil untuk mampu memberikan perlindungan" (Crouch 1999:151-152).

Pembunuhan Aidit

Pada tahun 1984 Mayjen Yasir Hadibroto dengan bangga menceritakan bahwa setelah Aidit ditangkap oleh pasukannya, maka pada 22 November 1965 dialah yang telah "mengantarkan gembong komunis pemberontak ini ke neraka" (Nasution 6 1988:441 lampiran 10). Ini kata-kata yang digunakan Jenderal Yasir, apakah itu sekedar kata-kata kebencian dan amarah serta sedang mabuk di atas angin atau ia memang merasa memiliki kapasitas menentukan tempat seseorang ke dalam neraka. (Astagfirullah, bagi mereka yang percaya sebenarnya sorga dan neraka itu semata-mata rahasia Allah jua).

Setelah ditangkap oleh pasukan Kostrad di bawah Kolonel Yasir, Aidit ditahan beberapa jam. Pada saat itu seorang perwira membuat sejumlah potret. Pada tahun

1980, di London Carmel Budiharjo menerima enam lembar foto Aidit tersebut dan dimuat dalam buletin milik *The Indonesian Human Rights Campaign TAPOL*, November 1980. Selanjutnya Aidit diikat dan dimasukkan ke dalam kendaraan militer. Seorang mayor dari Markas Komando Divisi Semarang datang kepada Kolonel Yasir meminta agar Aidit ditahan di Semarang untuk dilaporkan kepada Presiden Sukarno. Yasir pura-pura setuju dan mengelabui sang mayor (C Budiardjo 1997:54).

Dengan datar Jenderal Yasir menceritakan bahwa ia membawa Aidit ke pinggir sumur tua kering yang tak terpakai yang telah diperiksa anak buahnya. Ia mengatakan kepada Aidit bahwa ke dalam sumur semacam itu tempat Jenderal Yani dibunuh, kini giliran Aidit akan mengalami hal yang sama. Setelah ia menembak Aidit di depan tiga anak buahnya, ia segera memerintahkan untuk memasukkan mayatnya ke sumur, lalu menimbuninya dengan tanah dan pohon pisang yang dibabat dari sekitarnya. Keesokan harinya, **“Untuk menghilangkan jejak**, saya perintahkan prajurit-prajurit menumpuk kayu kering di atas yang sudah dipadati tanah dan tebang pohon pisang itu. Kayu-kayu kering itu kemudian saya perintahkan membakarnya...” (huruf tebal hs) (Nasution 6 1988:442). Jejak apa yang sebenarnya hendak dihilangkan, jejak pembunuhan itu atau jejak mayat Aidit. Lalu dengan tujuan apa ia menghilangkan jejak itu, sedang ia memberikan pengakuannya secara tertulis yang pasti merupakan jejak nyata. Tempat pembunuhan itu konon berada di belakang sebuah sekolah menengah di Boyolali (*Detak* 5 Oktober 1998:18). Dua hari kemudian ia melaporkannya kepada Jenderal Suharto yang memanggilnya ke Yogya, bahwa Aidit telah dibereskan sebagaimana instruksi Suharto. Jenderal Suharto “tersenyum penuh arti” (Nasution 6 1988:442). Senyuman Jenderal Suharto yang penuh arti itu berarti bahwa tugas yang diberikan oleh Suharto kepada Yasir untuk membunuh Aidit telah dijalankan dengan saksama. Menurut Mayjen Yasir penembakan itu dilakukan dalam keadaan perang (Nasution 6 1988:442). Rupanya yang dimaksudkannya dengan perang adalah penangkapan besar-besaran, pengejaran dan pembantaian rakyat sipil tanpa senjata.

Dalam penutup pengakuannya terdapat pernyataan gagah, **“...kejadian sejarah kiranya perlu juga menjadi lurus, agar kelak tidak menjadi sumber yang sesat”** [huruf tebal hs] (Nasution 6 1988:443). Coba kita baca sekali lagi, sungguh tidak mudah mengartikan kata-kata yang cukup sederhana ini dalam konteks penangkapan dan penembakan mati Aidit, dan usaha penghilangan jejak oleh Jenderal Yasir. Mungkin dengan kata lain pengakuannya itu guna meluruskan sejarah, tapi entah sejarah yang bagaimana dan macam apa yang dimaksudkannya, apakah usaha penghilangan jejak itu juga termasuk meluruskan sejarah. Kemudian tentang ‘agar kelak tidak menjadi sumber yang sesat...’; pendeknya diperlukan seorang pakar bahasa untuk mengertikannya.

Ketika ditangkap Aidit secara resmi masih menjabat Menteri Koordinator (Menko) Wakil Ketua MPRS. Eksekusi tersebut telah menghilangkan kesempatan untuk mengorek keterangan Aidit di depan pengadilan, dengan demikian kesempatan untuk membuat terang setidaknya sebagian dari beberapa hal yang gelap seputar G30S menjadi musnah. Barangkali ini yang dimaksud Jenderal Yasir

dengan **'kejadian sejarah yang lurus'** atau **meluruskan sejarah**, atau dan **'tidak menjadi sumber yang sesat'**.

Sebelum ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto seperti tersebut di atas, konon Aidit menulis pernyataan yang kemudian dimuat oleh koran Jepang Asahi Shimbun, Tokyo pada permulaan 1966. Konon pernyataan itu sebanyak 50 halaman folio dan dijadikan bukti utama bahwa PKI mendalangi G30S. "Sayalah yang bertanggungjawab penuh atas terjadinya insiden 30 September dengan bantuan tokoh2 PKI lainnya dari organisasi2 rakyat yang bernaung dibawah PKI". Selanjutnya diuraikan tentang rencana-rencana PKI sebelumnya, perjalanannya ke Jateng dan rencana kelanjutannya (Max K Ragi Buana Oktober 1969:9-12). Sementara itu dalam pengakuannya tersebut di atas, Mayjen Yasir Hadibroto tidak menyebutkan adanya catatan yang dibuat oleh Aidit. Dapat dicatat bahwa pengakuan tertulis Mayjen Yasir tersebut termuat dalam seri buku Jenderal Dr AH Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru* sebagai lampiran nomor 10. Jenderal Nasution tidak memberikan komentar apa pun tentang lampiran yang berisi laporan pembunuhan Aidit tersebut.

Karena tidak adanya bukti yang dibebankan maka apa yang disebut pengakuan Aidit itu kemungkinan besar hanya rekayasa alias penyesatan pihak intelijen militer. Bahwa Aidit membuat suatu pernyataan sebelum dieksekusi, itu mungkin saja, tetapi kenyataannya sampai saat ini dokumen itu tak pernah diumumkan secara resmi oleh pemerintah Orba, bahkan penembakan matinya juga tidak. Dalam pengadilan para pelaku G30S, sidang terus-menerus digiring agar tertuduh dan para saksi selalu menumpahkan segalanya kepada Aidit dan PKI, toh Aidit tak bisa menyangkal apa pun dari alam kubur. Rezim militer Orba mengabadikannya dalam bentuk buku pelajaran sejarah, monumen, film dsb.

Ketika Jenderal Suharto telah rontok dari singgasananya dan rezim militer Orba sedang dihujat habis-habisan oleh rakyat, maka Jenderal Yasir memberikan keterangan yang berbeda tentang kematian Aidit. Rupanya ia mencoba berkelit guna mengantisipasi jalannya perkembangan jaman, siapa tahu ia akan jadi salah satu terdakwa pelanggaran hak asasi manusia. Dikatakan olehnya bahwa Aidit sebagai Menko merasa tidak layak ditangkap pasukan yang dipimpin seorang kolonel (Yasir Hadibroto). "Karena merasa dilecehkan itu, Aidit kemudian meminta pasukan saya menembak mati dirinya. Ya, saya sih sebagai prajurit yang patuh dan penurut, langsung menuruti permintaannya. Karena dia mintanya ditembak, ya saya kasih tembak" (*Sinar Pagi* 29 September 1998). Tidak ada lagi pernyataan prajurit gagah perkasa penuh kebanggaan seperti pengakuan tertulisnya yang termuat dalam buku Jenderal Nasution tersebut ketika Jenderal Yasir beserta rezim militer Orba sedang tinggi berkibar, yang tinggal seorang "prajurit penurut dan lugu". Jadi rupanya prajurit Yasir Hadibroto yang "patuh dan penurut serta lugu" itu pun akan membebaskan Aidit andaikata itu permintaannya...

Buku Putih Sekneg mentahbiskan Aidit sebagai dalang utama G30S. Dalam kenyataannya ia tidak pernah memegang wayang-wayangnya, ada dalang-dalang yang tanpa diketahui olehnya serta merta menyerimpung Aidit tanpa berkutik dan melemparkannya ke lubang bawah tanah. Aidit adalah salah satu aktor tragis yang

tidak pernah sempat bermain menunjukkan keboleहannya sejak tanggal 30 September 1965 sampai ia ditembak mati oleh wayang dari dalang yang sebenarnya. Pelaku pinggiran ini telah dinobatkan sebagai aktor utama atau dalang utama (ini soal semantik saja) oleh Buku Putih, karena buku ini telah mengkondisikan sejarah PKI dan tokoh ini menuju G30S dengan skenario lengkap (Bahan dari Harsutejo, *G30S Sejarah yang Digelapkan*, Hasta Mitra, Jakarta, 2003).

G30S Dirancang Untuk Gagal

Oleh: Harsutejo

Barat Menggadang Kejatuhan Indonesia

Dalam bulan Desember 1964, seorang Duta Besar Pakistan di suatu negara Eropa menulis laporan kepada Menteri Luar Negeri Zulfikar Ali Bhutto antara lain berisi percakapannya dengan seorang perwira intelijen Belanda yang bekerja di Nato. Sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya suatu kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal. Dengan itu akan terbuka kesempatan legal yang ditunggu-tunggu bagi AD untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Sukarno sebagai tawanan AD. Indonesia akan jatuh ke dalam pangkuan Barat laksana sebuah apel busuk. “...Indonesia was going to fall into the Western lap like a rotten apple...Western intelligence agencies would organize a premature’s communist coup...[which would be] foredoomed to fail, providing a legitimate and welcome opportunity to the army to crush the communists and make Sukarno a prisoner of the army’s goodwill” (Scott 1985:18). Ini benar-benar sesuatu yang amat menarik, bahwa apa yang akan terjadi di Indonesia telah ‘diramalkan’ di negeri lain. Banyak dokumen rahasia lain yang telah menggadang perkembangan semacam itu terjadi di Indonesia.

Gagal Sejak Perencanaan

Jika ada suatu gerakan militer yang begitu penting dalam sejarah Indonesia dan gagal sudah dari rancangan permulaannya, maka itulah G30S. Pertama-tama tidak ada rencana alternatif, mereka hanya memiliki satu rencana, artinya secara strategis mereka telah menemui kegagalan sejak mula (Nasution *Senarai I* 1993:26). Seolah mereka begitu yakinnya bahwa gerakan mereka pasti berhasil. Dalam rencana G30S, wilayah Jakarta dibagi dalam tiga sektor, yakni Sektor Selatan, Tengah dan Utara. Pada saat diperlukan, ketika mereka dihubungi ternyata semuanya tidak ada di tempat. Yang lebih buruk lagi pasukan mereka Yon 434 Diponegoro dan Yon 530 Brawijaya tidak mendapat jatah makanan, akhirnya Yon Brawijaya minta makan ke markas Kostrad (Nasution 6 1988:266). Pada saat

gerakan dimulai, tidak satu pun dapur umum yang berfungsi, akibatnya para prajurit kelaparan.

Pembunuhan Para Jenderal

Pasukan Pasopati yang bertugas menangkap sejumlah jenderal dipimpin oleh Lettu Dularip secara bergelombang berangkat dari Lubang Buaya pada jam 03.00-03.15 dalam tujuh kelompok. Dalam brifing sebelum berangkat, Letkol Untung menyatakan bahwa tugas mereka adalah menangkap sejumlah jenderal untuk diserahkan kepada Pasukan Pringgodani di Lubang Buaya sebelum dihadapkan kepada Presiden Sukarno. Dalam kenyataannya tiga orang jenderal telah dibunuh di tempat. Sementara itu empat yang lain dibawa dalam keadaan hidup ke Lubang Buaya, atas perintah Syam atau dan Mayor Suyono mereka dibunuh juga. Ini merupakan sesuatu yang bersifat fatal, tidak ada ancaman apa pun juga yang membuat mereka terpaksa melakukan pembunuhan itu..

Pengumuman G30S Disusun Dengan Cermat

Dalam pengumuman di RRI jam 07.00 1 Oktober 1965 disebut bahwa G30S di bawah Letkol Untung dari Cakrabirawa telah berhasil menggagalkan ancaman kup Dewan Jenderal yang disponsori oleh CIA dan melindungi Presiden Sukarno. Disebut pula bahwa gerakan itu semata-mata gerakan dalam AD melawan Dewan Jenderal. Pengumuman pertama G30S ini penuh teka-teki dan sangat samar-samar, perlindungan bagaimana yang dilakukannya terhadap Presiden Sukarno tidak jelas. Hal ini membuat orang terpaku diam di tempat menunggu perkembangan selanjutnya (Johnson 1976:14-15). Hampir dapat dipastikan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang dirancang dengan matang oleh Ki Dalang agar tidak ada pihak lain yang melakukan langkah-langkah menyokong atau pun melawan. Hanya Ki Dalang yang telah mengantongi skenarionya, agar adegan berikutnya dapat berlangsung secara mulus.

Pengumuman berikutnya disiarkan pada jam 13.00 tentang akan dibentuknya Dewan Revolusi sebagai sumber segala kekuasaan negara, sedang kabinet yang ada menjadi demisioner. Dalam hal ini nama Presiden Sukarno sama sekali tidak disebut-sebut. Pengumuman ini jelas bertentangan dengan pengumuman pertama dengan dalilnya bahwa gerakan itu merupakan gerakan di dalam AD. Lagi pula dalil pertama itu tidak ada urusannya dengan pembentukan Dewan Revolusi, lebih-lebih dengan pendemisioneran kabinet di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Tidak berlebihan jika hal ini disebut sebagai agak anti Sukarno (Johnson 2000:93). Sebenarnya bukan sekedar agak anti, akan tetapi di atas kertas merupakan kudeta terhadap Presiden Sukarno, sekalipun dalam kenyataan di lapangan sama sekali tidak terjadi apa pun kecuali penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal, pendudukan RRI dan Telekom. Dengan demikian gerakan dengan pasti menjauhkan diri dari dukungan Presiden Sukarno, sesuatu yang tidak akan

diperbuat oleh kubu politik legal mana pun ketika itu, dukungan Bung Karno sesuatu yang mutlak diperlukan. Betapa kontradiktifnya pernyataan-pernyataan G30S satu sama lain.

Setelah keputusan pertama tentang susunan Dewan Revolusi maka diikuti keputusan kedua yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara RI diambilalih oleh G30S, alias kudeta! Lalu disebutkan bahwa berhubung komandan G30S berpangkat letkol maka dilakukan kenaikan dan penurunan pangkat. Dengan demikian gerakan sedang menggalang permusuhan lebih luas, di samping kini terang-terangan telah mengambil alih kekuasaan negara RI [yang di atas kertas itu]. Di sinilah Mayjen Suharto memiliki landasan dan polesan legalitas untuk mengambilalih komando AD dengan cepat tanpa konsultasi dengan Presiden Sukarno (Johnson 2000:94).

Kantor Telekom diduduki oleh G30S dan semua saluran komunikasi diputuskan. Tentu saja hal ini sangat merugikan berbagai komunikasi banyak pihak. Akan tetapi pihak Angkatan Darat tetap memiliki sistem komunikasi yang berfungsi (Johnson 2000:92). Sekali lagi yang diuntungkan bukan pihak gerakan, dalam hal ini yang diuntungkan adalah pihak AD, setidaknya komunikasi lawan-lawan Jenderal Suharto menjadi lumpuh atau setengah lumpuh.

Sementara orang bilang bahwa dokumen-dokumen G30S disiapkan secara serampangan, karenanya saling bertentangan. Seperti ditulis *Cornell Paper*, “Seluruh siaran memperlihatkan tanda tergesa-gesa dan rasa bingung”, pengumuman selanjutnya menunjukkan rasa panik (Anderson & McVey 2001:69,129). Dari fakta-fakta dokumen yang diumumkan tersebut jelas bahwa **dokumen-dokumen G30S telah disusun dengan sangat cermat oleh sang dalang sebenarnya justru untuk merugikan dan menggagalkan gerakan**. Sebagian dokumen itu disodorkan oleh Syam kepada Letkol Untung untuk ditandatangani, sebagian yang lain sang komandan tidak tahu menahu, dengan demikian terdapat komandan gelap yang melewati Letkol Untung.

Aidit Dijadikan Tong Sampah

Di depan pengadilan Syam menimpakan semua hal itu, dari pembunuhan jenderal dan penyusunan dokumen kepada bosnya yang bernama DN Aidit, Ketua PKI. Orang tidak perlu menjadi pakar untuk menganalisis bahwa Aidit bukanlah orang setolol itu, kecuali ia berada dalam posisi sebagai agen CIA, dengan begitu agen yang agak pintar. Ia diakui sebagai seorang pemimpin komunis kaliber internasional, setidaknya pemimpin komunis nomor tiga di dunia. Rupanya Syam merasa aman mengatakannya demikian dengan membuat Aidit sebagai keranjang sampah, karena toh Aidit takkan dapat membela diri dari kubur. Barangkali itu memang bagian dari skenario di balik layar sebagai yang telah diungkapkan oleh berbagai dokumen rahasia seperti di atas. Seluruh teks dokumen yang diumumkan G30S “...suatu cerminan luar biasa tentang cara pikir politis dari kelompok kudeta: campuran antara slogan ideologis ‘kanan’, dendam pribadi, radikalisme moralistik,

dan ketidakjelasan” (Anderson & McVey 2001:49). Pengumuman celaka semacam itu disebut oleh Syam sebagai konsep dari seorang tokoh politik dunia bernama Aidit, sedang seorang pelajar politik pemula pun akan tahu miskinnya kandungan politik pernyataan-pernyataan tersebut. Pengadilan sandiwara ciptaan Jenderal Suharto segera menelan segala keterangan tidak masuk akal itu yang memang dicarinya atau telah disetel dalam skenarionya.

Perkembangan menunjukkan hanya ada satu orang yang diuntungkan dengan hal-hal tersebut di atas, yakni Mayjen Suharto. Dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal itu Jenderal Suharto memiliki landasan amat kuat tak tergoyahkan untuk melakukan langkah-langkah pembelaan kehormatan korps militer umumnya dan Angkatan Darat khususnya yang dapat dilanjutkan dengan penyelamatan negara dan bangsa menghadapi kudeta terhadap Presiden Sukarno, (sekaligus menggantikan posisi Jenderal Yani). Dan itulah yang dilakukan dan dikatakannya. Jenderal Suharto pada tahap pertama penumpasan G30S yang dilanjutkan dengan tuduhan terhadap PKI dengan kegiatan Syam cs dan keberadaan Aidit, dengan menimbulkan histeria massa dan mengeksploitasi emosi tinggi banyak pihak berdasar psikologi massa luas yang telah dirancangnya. Pada tahap lain dalih pun menjadi berbeda, bahkan bertolak belakang, seperti keterlibatan Sukarno dalam G30S. Dari berbagai kelemahan dan kesalahan mendasar yang merugikan dan bahkan menyabot diri sendiri, maka hanya ada satu kesimpulan bahwa G30S memang dirancang untuk gagal sebagai tangga panjatan sang dalang sebenarnya (Bahan dari Harsutejo, *G30S Sejarah yang Digelapkan*, Hasta Mitra, Jakarta, 2003).

Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat

Oleh: Harsutejo

Bung Karno Gandrung Persatuan

Bung Karno yang sejak remaja berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia, pada puncak kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba dituduh dan diperlakukan sebagai orang yang hendak melakukan perebutan kekuasaan alias kudeta, bahkan sebagai pemberontak. Betapa absurdnya!

Prof Dr Brigjen Nugroho Notosusanto menulis, “Pada 1 Oktober 1965 **beberapa kelompok pemberontak** (huruf tebal hs) berkumpul di Pangkalan Udara Halim. Kelompok Cenko menempati gedung Penas, Presiden beserta pengikut-pengikutnya menempati rumah Komodor Udara Susanto, dan kelompok ketiga (yang lebih kecil jumlahnya), yang terdiri dari Ketua Aidit beserta pembantunya, menempati rumah Sersan Dua Udara Suwardi” (1993:31).

Kelompok pertama terdiri dari Letkol Untung, Kolonel Latief, Jenderal Suparjo dsb menempati gedung Penas. Perlu disebutkan bahwa gedung Penas tidak berada dalam lingkungan Pangkalan Halim, tetapi di luarnya yakni di Jl Baipas. Selanjutnya yang dimaksudkan Presiden Sukarno dan pengikut-pengikutnya, pertama-tama tentulah para pengawal yang terdiri dari Kolonel Saelan, Wadan Resimen Cakrabirawa dan AKBP Mangil serta Kombes Pol Sumirat sebagai ajudan. Selanjutnya sejumlah pejabat yang berada dalam rombongan presiden ketika datang ke Halim yakni Brigjen Sunaryo, Jaksa Agung Muda, tentu saja juga tuan rumah yakni Men/Pangau Laksdya Omar Dani dan Panglima Koops Komodor Udara Leo Wattimena. Selanjutnya bergabung Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa yang baru datang dari Bandung. Kemudian atas panggilan bergabung juga Waperdam II Leimena, Jaksa Agung Brigjen Sutardio, Men/Pangal Martadinata, dan ajudan Presiden Kolonel Bambang Wijanarko. Siangnya Men/Pangak Irjen Pol Sucipto Yudodiharjo bergabung dari Sukabumi.

Itulah sejumlah pembantu presiden dan pejabat negara dalam kelompok Presiden Sukarno yang ada di Halim pada 1 Oktober 1965. Adakah Prof Dr Nugroho memasukkan semuanya ke dalam kelompok pemberontak, atau sebagiannya, tidaklah ada penjelasan. Kenyataan bahwa sebagian besar di antara mereka kemudian ditahan ketika rezim Jenderal Suharto telah mengkonsolidasikan diri, maka setidaknya mereka itulah yang dimaksud, setidaknya untuk memberikan pembenaran terhadap analisis sang profesor. "...Jenderal Suharto... menuduh bapak bangsa ini telah bersekongkol dengan kaum komunis... untuk menjatuhkan pemerintahannya sendiri. Tuduhan yang menggelikan terhadap bapak bangsa ini sangatlah jahat dan beracun..." (Oltmans, CIA 2001:7).

Rangkaian cerita dihimpun oleh Jenderal Nasution dengan memberikan rinciannya. Dalam pidatonya di Senayan malam hari pada 30 September 1965 mengambil dunia pewayangan antara lain BK mengutip nasehat tokoh Kresna kepada ksatria Arjuna sbb:

"Tugas ksatria ialah berjuang. Tugas ksatria ialah bertempur bila perlu. Tugas ksatria ialah menyelamatkan, mempertahankan tanah airnya. Ini adalah tugas ksatria. Ya benar di sana engkau punya saudara sendiri. Engkau punya guru sendiri. Mereka itu mau menggempur negeri Pandawa, gempur mereka kembali. Itu adalah tugas kewajiban tanpa hitung-hitung untung atau rugi. Kewajibanmu kerjakan!

Saudara-saudara sekarang boleh pulang tidur dan istirahat, sedangkan Bapak masih harus bekerja menyelesaikan soal-soal yang berat, mungkin sampai jauh malam nanti..." (Nasution 6 1988:201).

BK selain seorang negarawan besar, ia juga seorang intelektual yang dengan bacaannya yang amat luas mendalami berbagai aspek budaya Indonesia dan

bangsa-bangsa lain di dunia ini. BK sangat mengenal kisah-kisah pewayangan beserta filosofinya, mungkin melebihi seorang dalang atau ahli pewayangan. Dalam setiap pidatonya beliau hampir selalu mensitir kata-kata dan kebijakan para pujangga dunia Timur maupun Barat, tokoh-tokoh dunia, dan juga kisah dalam pewayangan.

Menurut penuturan Jenderal Nasution selanjutnya, kalimat terakhir kutipan di atas tidak terdapat dalam rekaman Departemen Penerangan, mungkin dihapus, katanya. Kisah berlanjut bahwa pada jam 22.00 ketika di Senayan tersebut, ajudan BK Kolonel Wijanarko menyampaikan sepucuk surat dari Kolonel Untung.^{i[1]} Setelah memasukkan surat ke sakunya, BK menuju WC diikuti oleh para ajudan dan pengawal. Setelah ada di beranda BK membaca surat itu lalu dimasukkan kembali ke sakunya. Menurut laporan seorang ajudan beliau nampak gembira, kemudian masuk ruangan dan pidato berapi-api. Lalu BK menyuruh Waperdam Leimena menyanyikan lagu-lagu Ambon yang menambah keriangannya suasana.

Selanjutnya Jenderal Nasution berkisah, diperkirakan isi surat Untung tersebut mengenai pelaksanaan perintah Presiden untuk menindak Jenderal Yani dan Jenderal Nasution. Menurut penilaian Wadan Cakrabirawa Saelan, Letkol Untung tidaklah terlalu bodoh untuk menitipkan surat tentang suatu gerakan militer yang mempunyai nilai kerahasiaan tinggi kepada seorang pesuruh sebagai ditulis Jenderal Nasution dari kesaksian Wijanarko (Saelan 2001:190). Pada jam 24.00 BK kembali ke Istana, kemudian seperti biasa pada malam itu beliau menginap di rumah isterinya yang ketiga, Dewi di Jl Gatot Subroto. Keesokan harinya ketika BK berada di Halim, beliau menyuruh ajudan Suparto untuk mengambil jas yang semalam dipakai di rumah Dewi. Menurut kesaksian seorang ajudan, surat tersebut diambil dari saku jas dan dirobek-robek (Nasution 6 1988:201). Seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia, mengenal BK sebagai orator yang selalu berpidato berapi-api sejak muda. Beliau pun menyukai bernyanyi dan menari bergembira ria dalam banyak kesempatan. Jadi kisah Jenderal Nasution tentang hal itu mengenai BK sama sekali bukan hal baru, atau dalam bahasa jurnalistik bukan berita. Kisah itu sekedar menggiring pembacanya yang dapat dibodohi dan ditipu untuk mendapatkan persepsi bahwa BK terlibat G30S, bahkan yang memerintahkannya alias yang mendalangnya. Kisah tersebut, di samping sebagai penggambaran keadaan Senayan ketika itu, berdasar kesaksian Kolonel KKO Bambang Wijanarko, ajudan BK. Kesaksian ini dibantah keras oleh Kolonel Pomad Maulwi Saelan, Wadan Cakrabirawa yang malam itu tidak pernah beranjak dari dekat BK sampai kembali ke istana, tak ada gerak gerik BK yang lepas dari pengamatan Saelan. Ia menganggap hal itu sebagai aneh dan direkayasa. Keterangan yang direkayasa ini mendapat imbalan, Bambang Wijanarko tidak ditahan dan Saelan yang di depan pemeriksa membantah dengan tegas keterangan Bambang Wijanarko ditahan selama lebih dari 4 tahun (Sophiaan 1994:116, Saelan 2001:189).

Demikianlah dongeng semacam kisah detektif yang dirangkai oleh Jenderal Nasution dalam bukunya dengan judul gagah *Memenuhi Panggilan Tugas*. Yang disebut Jenderal Nasution dengan laporan atau kesaksian ajudan tentulah kesaksian hasil interogasi terhadap mereka itu dalam iklim hujatan terhadap BK,

pengikut dan ajarannya. Sudah bukan rahasia bahwa interogasi itu model standar interogasi rezim militer penindas yang sedang berada di atas angin dengan cara apa pun untuk mendapatkan kesaksian yang dikehendakinya, bahkan sering segala sesuatu telah diatur dan tinggal ditandatangani, dengan skenario yang paling tidak masuk akal pun. Mereka yang membangkang dan menolak mengikuti skenario sang interogator kalau perlu dapat lenyap setiap saat, itu bukan berita baru. Mari kita simak catatan mantan Menteri Negara Oei Tjoe Tat berikut yang ditahan di RTM Budi Utomo pada tahun 1966 tentang interogasi terhadap sekretaris pribadi BK Muallif Nasution.

“Karena tetap menolak memberikan keterangan seolah Presiden Sukarno pernah memerintahkan Jenderal Mursid membunuh sesama jenderal, menurut cerita teman-teman setahanan, sebagai hukuman ia dipaksa merangkak di atas batu dan kerikil...” (Oei Tjoe Tat 1998:248).

Seorang Muallif Nasution dapat diperlakukan semacam itu, apalagi para ajudan dan pengawal Presiden Sukarno, dengan jentikan jari dapat dikirim ke dunia lain setiap saat. Oleh karena itu kesaksian semacam itu, termasuk yang disodorkan di depan Mahmilub dan pengadilan yang lain seputar G30S untuk menyusun sejarah versi Orba, diragukan validitasnya (Asvi Warman Adam, *Tempo* 8 Oktober 2000:60). Tapi justru kesaksian Kolonel Wijanarko macam itulah bagi Antonie Dake merupakan hal amat penting yang laporan lengkapnya luput dari bukunya edisi 1973 dan memperkuat kesimpulannya pada edisi 2002 tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai Istana Merdeka (Dake 2002:xi-xii). Bahwa inisiatif G30S untuk mengambil tindakan terhadap sejumlah jenderal datang dari Presiden Sukarno, selanjutnya Aidit cs menggunakan kesempatan untuk membantunya sekaligus memperkuat posisinya terhadap AD (Dake 2002:ix).ⁱ[2] Wijanarko merupakan satu-satunya bekas ajudan BK yang bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan interogator yang telah direkayasa. “Saya dengan tegas telah membantah pengakuan ajudan tersebut”. Demikian penekanan Maulwi Saelan, mantan ajudan BK yang telah mendampingi beliau sampai hari senjanya (Saelan 2001:316).

Sejak muda sampai wafatnya BK mendambakan persatuan bangsa yang dalam perkembangannya dirumuskan dalam persatuan Nasakom. BK sangat prihatin pada hari-hari terakhirnya ketika ia melihat pembunuhan besar-besaran terhadap sekelompok bangsanya sendiri, termasuk pendukung dan pengikut setianya, tanpa dapat mencegahnya. Justru BK yang selalu mendambakan persatuan dan menghindari kekerasan dan perpecahan itulah yang dipergunakan Jenderal Suharto dan kawan-kawannya dalam politik perpecahannya, hal itu seiring dengan kepentingan Blok Barat dalam perang dingin. Pertama-tama mengiliminir para jenderal yang menjadi saingan dan penghalang kariernya sendiri. Dengan dalih membela kehormatan prajurit dan melawan kudeta terhadap Presiden Sukarno serta menyelamatkan tanahair, maka PKI dan sekutunya serta pengikut BK yang lain dilibas. Subandrio, Omar Dani dan AURI merupakan panjatan terakhir untuk menjatuhkan Presiden Sukarno. Dan akhirnya BK pun dituduh sebagai terlibat G30S, dalang G30S, bahkan sebagai pemberontak! Dambaan persatuan BK ini dalam keadaan kritis masa itu diulas oleh wartawan Adam Schwarz sebagai

kesalahan kalkulasi amat besar, "... colossal miscalculation by a man had put far too much faith in his own powers of persuasion" (Schwarz 1994:1).

Agaknya sebagian besar pendukung BK ketika itu berharap bahwa sang penyambung lidah rakyat akan segera memberikan perintah untuk menindak keras para pembangkang, sebelum sang pembangkang lebih bersimaharajalela dan menjerumuskan negeri ini. Sebelum meletusnya G30S, Presiden Sukarno memiliki cukup wewenang dan kekuatan untuk menggantikan siapa pun juga termasuk Jenderal Yani dan Jenderal Nasution serta memberhentikannya dari segala jabatan. Sukarno tidaklah sebodoh dongengan Jenderal

Nasution untuk melakukan kasak-kusuk dan avonturisme kekanak-kanakan yang tidak bermutu. Sukarno adalah seorang negarawan yang terus menerus mendambakan dan memperjuangkan persatuan rakyat Indonesia. Negarawan besar itu pada saat-saat terakhir telah mempertaruhkan kekuasaan dan pribadinya untuk mempertahankan persatuan yang sedang dipotong-potong oleh rezim militer Jenderal Suharto. Taktik yang digunakan Jenderal Suharto dalam pembantaian PKI dan gerakan kiri sebagai kekuatan politik yang tangguh, kemudian diikuti sasaran berikutnya: Presiden Sukarno, dipuji oleh AS dalam catatan untuk Presiden Johnson setelah suatu pertemuan dengan Dubes Green tertanggal 23 Februari 1966 sebagai brilian. "*After employing brilliant 'salami' tactics in eliminating the PKI as an effective political force, Generals Nasution and Suharto are now temporizing in using the political leverage they have gained against Sukarno*" (CIA 2001:403).i[3]

Bung Karno adalah penyambung lidah rakyat yang anti kekerasan dan penindasan. Jenderal Suharto justru menggunakan 'celah' anti kekerasan itu guna melakukan langkah selanjutnya untuk menjinakkan BK serta meringkusnya. BK selalu mendambakan persatuan dan anti kekerasan, dan terus-menerus menjaganya sampai detik terakhir kekuasaannya, justru memberi peluang kepada Jenderal Suharto untuk melakukan kekerasan berdarah besar-besaran dan secara sistematis untuk membasmi sekelompok rakyat Indonesia yang setia mendukung BK, anggota PKI dan ormas kiri. Sampai detik terakhir BK menolak usulan para pengikutnya terutama dari kalangan Angkatan Bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap langkah-langkah kekerasan berdarah Jenderal Suharto. Seperti dicatat oleh seorang wartawan Belanda yang sempat dekat dengan BK, Willem Oltmans, "Sejak awal kup tahun 1965, sejumlah jenderal dan laksamana yang setia pada Sukarno, menyatakan siap membantu dan sering bertanya kepadanya, 'Berilah komando maka kami akan memusnahkan para pengkhianat'" (Oltmans 1995/2001:241). Dengan menggunakan istilah lazim yang salah kaprah, akal licik busuk machiavelisme Suharto berhadapan dengan pemain bersih BK.

Sejak sidang kabinet di Bogor pada 6 Oktober 1965 dan seterusnya digambarkan oleh John D Legg sbb:

"Ia mulai mencoba menyesuaikan diri dengan situasi dan mencoba menyelamatkan martabat dan kewibawaan dirinya sendiri. Tetapi nampaknya ia tidak berhasil. Pada bulan-bulan berikutnya terjadi penjurangan politik secara

berangsur-angsur, dan terjadi pula permulaan gelombang-gelombang pembunuhan yang memusnahkan PKI sebagai kekuatan dalam arena politik di Indonesia sampai selama-lamanya. Bulan-bulan ini menjadi ujian bagi keahlian Sukarno dalam tindak siasat berpolitik dan sekali lagi ia telah memainkan kartunya dengan cermat. Tetapi permainan ini telah gagal sejak awal... Jenderal Suharto bertindak berangsur-angsur... tidak tergoyahkan untuk membawa rezim Sukarno menuju akhir... (Legg 1985:454-455).

Seperti dicatat oleh Oei Tjoe Tat, pada 1 Oktober 1965, sesungguhnya berakhirlah sudah rezim Sukarno (Oei Tjoe Tat 1998:170). Selanjutnya setelah beberapa kali menemui Jenderal Suharto di Kostrad dalam rangka misi penyelesaian politik dari BK, catatannya berlanjut, “Bung Karno memang hebat, hanya di depan mikrofon. Jenderal Suharto tidak hanya menguasai mikrofon, juga peluru dan pentung” (Oei Tjoe Tat 1998:196). Ketika Jenderal Suharto tidak senang dengan pertanyaannya, dan dengan mata marah serta tinju menggebrak meja, maka ia mencatat lagi, “Saat itu barangkali saya sudah pucat. Syukur orang tak tahu karena lampu di Kostrad agak remang-remang” (Oei Tjoe Tat 1998:196).

Martir Fiktif Untuk Menjatuhkan Presiden Sukarno

Dalam rangka menjatuhkan BK dalam pelantikan kabinet yang baru dirombak (biasanya disebut dengan ejekan sebagai “kabinet 100 menteri”) pada 24 Februari 1966 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran. Jenderal Nasution mencatatnya sbb:

“Pahlawan-pahlawan Ampora mulai berjatuh di berbagai kota. Dobrakan strategis dari pihak sana [maksudnya dari BK, hs] untuk memberikan pukulan yang menentukan, justru menjadi pangkal kejatuhannya...

Sejak pagi hari pelantikan itu, jalan menuju Lapangan Merdeka penuh dengan massa demonstran. Ban-ban mobil dikempeskan, lalu dilintangkan di jalan, lalu-lintas macet. Jaket berdarah akibat mahasiswa yang kena tembak oleh tentara terus diarak-arak sehingga membakar semangat. Adanya mahasiswa yang gugur membuat pemuda-pemuda itu menjadi garang. Rentetan tembakan tentara mengisi udara sepanjang hari. Memang pagi-pagi telah ada pelajar dan mahasiswa yang luka parah akibat tembakan atau akibat tusukan bayonet. Pelajar yang gugur bernama Zubaidah dan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI Arif Rahman Hakim. Jenazah Zubaidah dikuburkan secara diam-diam, berbeda dengan Arif Rahman Hakim yang disemayamkan terlebih dulu di aula Fakultas Kedokteran UI...

Pada pagi 25 Februari 1966 puluhan truk mengiring jenazah Arif Rahman Hakim... begitu panjangnya. Orang memperkirakan tidak kurang dari satu juta penduduk ibukota mengiringnya... Kemudian keluarga almarhum datang ke rumah saya bersilaturahmi (Nasution 6 1988:381).

Sedang Suharto mencatat hal yang sama, baik dalam otobiografinya maupun dalam *Jejak Langkah Pak Harto* sbb:

“Kamis, 24 Februari. Hari ini Arif Rachman Hakim, mahasiswa UI, meninggal dunia dalam demonstrasi di muka istana. Arif Rachman Hakim adalah korban pertama dari demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI yang telah berlangsung selama lebih dari satu bulan. Arif Rachman Hakim kemudian dinyatakan sebagai Pahlawan Ampera... “ (Dwipayana 1 1991:47).

“Para mahasiswa berusaha masuk ke Istana. Pasukan Cakrabirawa yang bertugas menjaga keamanan di dalam jadi repot. Bentrokan tidak terelakkan dan lepaslah peluru... Dan rasa duka bukan saja meliputi keluarga kampus, tetapi juga kami yang mengirimkan karangan bunga tanda turut sedih...

Kejadian ini menyebabkan para mahasiswa tambah gundah dan menjadi marah. Maka mereka menaikkan lagi aksi-aksi mereka, sementara saya berusaha menenangkan mereka... “ (Soeharto 1989:163).

Demonstrasi itu dimotori oleh anggota militer dari RPKAD, Kostrad, dan Siliwangi yang menyamar sebagai mahasiswa dengan jaket kuning dengan senjata yang disembunyikan dalam jaket. Mereka membutuhkan martir seperti teori Goebbels sang pembantu Hitler yakni ciptakan keos dan martir. “Dan martir ini ditemukan pada sesosok jenazah Abdul Rahman Attaur, mahasiswa FKG UI anggota GMNI yang bukan aktivis KAMI/KAPPI”. Diceritakan bahwa konon ia mati tertembak di depan Istana Negara dengan jaket kuning yang berlumuran darah. Ketika ibu dari mendiang Abdul Rahman Attaur, seorang janda, dijemput dari Padang dibawa ke Jakarta untuk maksud propaganda, ia tidak mengenal nama Arif Rahman Hakim. Jika benar ada korban jatuh, kenapa si penembak tidak dicari dan diusut, sedang ketika itu Jenderal Suharto telah memegang kekuasaan riil. Juga kenapa tidak dilakukan autopsi, notabene ia seorang mahasiswa kedokteran, disemayamkan di UI. Benarkah peluru yang merenggut nyawanya senjata milik Cakrabirawa seperti yang dituduhkan? Notabene pasukan Cakra ketika itu dalam keadaan sangat defensif. Mengapa tidak diselidiki tuntas? Kini diketahui bahwa tidak ada nama Arif Rahman Hakim di FKUI 1965-1966. Bahkan juga tidak jelas asal usulnya, siapa orang tuanya, tempat lahirnya, siapa saudara-saudaranya, mengapa mereka tidak menuntut, dapatkah Orba menunjukkan KTPnya, kartu mahasiswanya dsb. Maka tak lain yang bernama Arif Rahman Hakim adalah tokoh fiktif rekayasa rezim Orba, diciptakan oleh Mayjen Sucipto, ketika itu kepala G-5 KOTI (Pakorba, siaran pers Februari 2002). Jika benar demikian maka sekali lagi menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuannya rezim Orba menghalalkan segala macam cara, dalam hal ini untuk menjatuhkan BK serta mepurukkannya. Jangan-jangan korban ditembak dari belakang oleh pasukan yang justru hendak menjatuhkan BK!

Dalam hal ini perlu kita simak catatan Maulwi Saelan, mantan Wadan Cakrabirawa sbb:

“Ketika pelantikan Kabinet 100 Menteri, sekitar pukul 09.30 saya berada di sekitar Posko Istana Negara memantau kegiatan-kegiatan Kami/Kappi melakukan demonstrasi. Tiba-tiba terdengar di radio Posko bahwa di lapangan Banteng telah terjadi insiden antara para demonstran dengan para petugas patroli Garnizun. Karena para demonstran berusaha merusak Tugu Pembebasan Irian Barat... Dalam demonstrasi tersebut tertembak seorang demonstran oleh petugas patroli Garnizun. Korban dilarikan ke RSUP Cipto Mangunkusumo. Siaran radio itu menyebutkan bahwa korban seorang mahasiswa UI yang bernama Arief Rahman Hakim.

Kira-kira pukul 11.00 para demonstran dengan menggunakan truk-truk tentara mengelilingi jalan-jalan sekitar Istana dengan membawa jaket kuning dengan noda-noda merah dikibarkan sambil meneriakkan: *Tjagrabirawa pembunuh!* Disebarkan issue bahwa mahasiswa tersebut ditembak oleh prajurit Tjagrabirawa di depan Gedung Pemuda seberang markas DKP.

Kebetulan hari itu petugas kawal Istana dari Batalion II KKO dengan komandan Kapten Hidrosin. Setelah mendengar teriakan-teriakan para demonstran, Kapten Hidrosin mengumpulkan pasukannya dan seluruh senjata prajurit yang bertugas diperiksa. Dalam pemeriksaan yang teliti, ternyata tidak terdapat satu pun senjata dari anggota-anggota yang bertugas yang mengeluarkan tembakan. Laras senjata semuanya bersih” (Saelan 2001:210-211).

Pada 1967 ketika Kolonel Saelan telah dipindahkan kembali ke Puspom ABRI, ia mendapat keterangan dari sejumlah rekannya bahwa penembakan di lapangan Banteng pada 1966 itu dilakukan oleh seorang anggota Pomdam V Jaya yang ketika itu bertugas di Garnizun Ibukota. Hal itu sesuai dengan siaran radio yang di dengarnya di atas. Selanjutnya Saelan pernah meminta kepada Brigjen dr Rubiono, Perwira Sandi AD yang selalu menjalankan tugas bersamanya dalam pengamanan perjalanan presiden, agar segera diusahakan visum et repertum terhadap Arief Rahman Hakim untuk dilaporkan kepada BK. Akan tetapi sampai dibubarkannya Resimen Cakrabirawa, visum itu tak pernah didapatkannya (Saelan 2001:211).

Tentu saja buku Jenderal Nasution dan buku-buku Orba yang lain tidak pernah bicara tentang autopsi jenazah sang martir dan visum et repertumnya. Mereka sama sekali tidak berkepentingan terhadap autopsi semacam itu, bahkan hasil autopsi para jenderal yang dikubur di Lubang Buaya pun tidak pernah diumumkan. Penyelidikan dan penuntutan terhadap para penembak pun tidak. Justru autopsi, penyelidikan, dan penuntutan semacam itu yang akan membuka kedok mereka! Menurut Saelan dengan dasar rekayasa martir itu telah dibentuk Resimen Laskar Ampera Arief Rahman Hakim sebanyak 7 batalion dengan bantuan Kostrad. Laskar ini sama dengan Angkatan ke V yang ditolak keras AD (Saelan 2001:217).

Tragedi Bung Karno

Selama kekuasaan rezim militer AD Orba, BK telah dizalimi dalam segala bentuknya, baik terhadap pribadi Sukarno maupun terhadap ajaran-ajarannya. Bahkan jasa-jasa BK yang telah menjadi sejarah pun telah dicoba untuk dihapusnya. Pernah ada masanya penulisan dan pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan menghilangkan nama Sukarno. Seperti ditulis sejarawan Dr Asvi Warman Adam, reduksi peran sejarah BK ini dengan tanpa malu pernah dicoba, "...muslihat yang dilakukan oleh sejarawan militer yang mencoba menghilangkan gambar Sukarno dalam sebuah foto pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan. Upaya ini tidak berhasil karena ada protes dari sejarawan lain – Abdurrachman Surjomihardjo"i[4] (Chambert-Loir 1999:572). Ketika wartawan *freelance* Roeder memberikan puja-puji ke atas pundak Jenderal Suharto, maka belum afdol baginya jika tidak dilengkapi dengan tendangan kaki ke bawah berupa serapah untuk Bung Karno yang disebutnya sebagai, "Degil dan keras kepala seperti anak kecil..." (Roeder 1977:248). Seperti khusus menjawab Roeder maka wartawan Willem Oltmans menulis, "Isapan jempol degil telah bertahun-tahun mengaburkan fakta tentang pendiri Republik Indonesia ini" (Oltmans 1995/2001:xviii).

Ketika membicarakan Bapak Bangsa Sukarno lama setelah wafatnya, tak jemu-jemunya Jenderal Suharto mengucap *mikul dhuwur mendhem jero*, seolah ia benar-benar orang yang menghormati Bung Karno, menghormati jasa-jasanya, tidak ingin dan tidak suka mengungkit-ungkit kesalahan dan aibnya, seolah tak ingin sedikit pun melukai hati para kerabat dan pengikut setia Bung Karno. Tetapi apa sebenarnya yang telah diperbuatnya terhadap Bung Karno sebagai Presiden maupun sebagai pribadi setelah kekuasaannya ia jarah? Terutama pada tahun-tahun akhir hayatnya, bapak bangsa itu sungguh-sungguh diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang oleh rezim militer Jenderal Suharto dan Suharto pribadi. Bahkan menurut kesaksian seorang mantan pengawal ketika Cakrabirawa dibubarkan dan digantikan dengan Satgas Pomad di bawah Letkol Norman Sasono, pelayan di istana pun diajar untuk melawan BK dan menolak menyediakan makan pagi untuk BK (lihat Saelan 2001:225).

Mula-mula BK di karantina di Istana Bogor, selanjutnya ke Istana Batutulis yang udaranya amat dingin tidak cocok untuk kesehatannya. Pangdam Siliwangi Mayjen HR Dharsono melarang BK meninggalkan wilayah hukum Jawa Barat, sedang Pangdam Jaya Mayjen Amirmahmud melarang BK memasuki wilayah DKI. Permohonan BK kepada Pejabat Presiden Jenderal Suharto untuk tinggal di Bogor dan Jakarta sekaligus tidak

pernah dijawab (*D&R* 31 Oktober 1998). Ketika keluarga BK diusir dari Istana Bogor oleh Pangdam Jaya, mereka hanya diberi waktu selama tiga jam (jam 08.00-11.00). Ibu Hartini hanya sempat membawa barang-barang kecil dan pakaian dibungkus dengan seprei, barang-barang lain ditinggalkan (Saelan 2001:325).i[5] Akhirnya atas permohonan keluarga kemudian BK dipindahkan ke Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala). Tak seorang pun anggota keluarga yang boleh menemaninya, dijaga ketat, sangat kesepian, dalam keadaan tidak terurus. "Sejak ditahan di Wisma Yaso, terutama saat-saat menjalani pemeriksaan, ia tidak boleh dikunjungi oleh siapapun termasuk keluarga, tidak

boleh nonton televisi, mendengarkan radio dan membaca surat kabar atau majalah dan bacaan lainnya” (Saelan 2001:324).

Dalam sebuah surat terbukanya kepada Jenderal Suharto yang ditulis dari Paris bulan April 1970, Dewi Sukarno menggugat dengan keras a.l.:

“Sukarno sekarang menjalani hidup yang sangat sulit. Hak-hak manusia yang paling minim pun tidak diberikan kepadanya. Satu-satunya saat ia bisa meninggalkan pengasingannya ialah untuk menghadiri upacara perkawinan anak-anaknya. Mobilnya kemudian dikawal oleh kendaraan panser dan siapa pun dicegah untuk mendekatinya. Ketika Sukarno pada upacara seperti itu, berdiri untuk mencium mempelai, yakni puterinya, dengan kasar ia ditarik kembali duduk di sofa oleh polisi militer yang mengawalnya... Dan Anda, Tuan Suharto, membiarkan Sukarno disiksa secara rohani dan jasmani... Anda yang seharusnya dituntut atas tuduhan membunuh orang-orang yang tak bersalah dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya atas nama perburuan PKI... Indonesia seharusnya tidak layak memiliki seorang presiden yang tangannya berlumuran darah...” (Oltmans 1995/2001:391-398).

Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap BK ala kadarnya saja. Kemudian beliau diinterogasi, saat yang amat membosankan. Pengambilan foto pada ultahnya yang terakhir hanya dapat dilakukan oleh keluarga dengan sembunyi-sembunyi, yang kemudian tersebar ke seluruh dunia. Maka Guruh dan Rachma harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya kepada pihak keamanan. Akhirnya BK dibawa ke RSPAD pada 11 Juni 1970. Di rumah sakit itu pun BK tidak mendapat layanan yang diperlukannya, misalnya sampai detik terakhir tidak tersedia mesin pencuci darah baginya (Rachmawati 1998:3-6). Foto terakhir tersebut menunjukkan wajah BK bengkak karena penyakit ginjal yang tak mendapatkan perawatan semestinya (lihat Saelan 2001:234). Pendeknya perawatan BK sekedar perawatan rutin tidak memadai, tidak ada perawatan medis yang optimal, padahal Bapak Bangsa yang ketika itu berusia 68 tahun dalam keadaan sakit. Ketika kaki BK bengkak, tidak ada langkah pengaturan diet misalnya, lukanya hanya dibersihkan. Hal ini amat berbeda dengan perawatan yang dialami Mao Ze Dong, meski situasi politik juga berbalik, ia masih tetap mendapatkan perawatan prima (dr Kartono Mohamad *D&R* 31 Oktober 1998). Jadi negara komunis Cina itu jauh lebih manusiawi dalam memperlakukan bapak bangsanya daripada negara Pancasila model Orba.

Dapat ditambahkan bahwa ketika Jenderal Suharto memerintahkan pembentukan tim interogasi terhadap BK, sejumlah perwira menolak karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Akibatnya para perwira ini dipecat, ditahan dan disiksa tanpa proses pengadilan (Ir Setiadi Reksoprodjo *Kompas* 3 Januari 2002:4).i[6] Selama diinterogasi enam bulan lamanya BK tidak boleh dikunjungi. Sementara itu tempat tinggal BK di Wisma Yaso itu tidak pernah dibersihkan, kamar mandinya sangat kotor, banyak tikus dan serangga. Lampu yang mati tak pernah diganti. Sementara dokter menganjurkan BK untuk jalan-jalan di kebun,

para penjaga melarangnya. Surat BK kepada Jenderal Suharto agar ia diperkenankan jalan-jalan tak pernah ditanggapinya. Demikian tulis Rachmawati (Oltmans, CIA 2001:90-91).^[7] Ketika diinterogasi oleh Brigjen Nicklani dari Tim Pemeriksa Pusat selama tiga bulan, BK dalam keadaan sakit parah. “Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang sangat kasar dengan memukul-mukul meja dan memaksakan jawaban. Akibat perlakuan kasar terhadap Bung Karno, penyakitnya makin parah karena memang tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya diberikan...” (Saetan 2001:321).

Nyonya Dewi Sukarno yang sempat menjenguk BK di rumah sakit, setelah berkonsultasi dengan sejumlah dokter AS, Prancis dan Jepang, menyimpulkan bahwa BK mengalami over dosis obat tidur. Dewi menuduh pemerintah Orba telah tidak sabar menunggu kematian BK yang telah ditunggunya selama tiga tahun, lalu mengambil langkah untuk mempercepat kematiannya (*Detik* 5 Oktober 1993). Pada saat-saat akhir kehidupan BK sampai wafatnya pada 21 Juni 1970, beliau dijadikan tahanan politik rezim militer Orba dengan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap dirinya sebagai yang telah dialami jutaan rakyat Indonesia. Sebenarnya BK praktis menjadi tapol sejak Maret 1966 di Bogor.

Keadaan yang dialami BK tersebut justru memperkuat kebenaran analisisnya tentang G30S dalam pelengkap pidato Nawaksara pada 10 Januari 1967, bahwa tragedi itu disebabkan berpadunya keblingernya pimpinan PKI [baca: Aidit cs], lihainya subversi Nekolim, dan adanya oknum-oknum yang “tidak benar” (Dinuth 1997:242). Dengan kata lain oknum yang tidak benar dalam jajaran militer AD yakni Jenderal Suharto cs yang telah menjalin kerjasama rahasia dan terselubung dengan AS dan Inggris untuk menggulung PKI dan semua gerakan pendukung BK dengan menggunakan momentum keblingernya Aidit cs dengan berbagai perangkat operasi intelijen, untuk akhirnya menjatuhkan Presiden Sukarno (Petikan dari Harsutejo, *G30S Sejarah yang Digelapkan*, Hasta Mitra, Jakarta, 2003).

G30S, Penculikan dan Pembunuhan Kasus Sutedja dan Nyoto

Oleh:Harsutejo

Kasus Gubernur Bali Sutedja

Setelah penculikan dan pembunuhan terhadap enam orang jenderal dan seorang perwira di pagi buta pada 1 Oktober 1965, maka budaya culik dan bunuh sudah menjadi umum di sepanjang kekuasaan rezim Orba. Kasus terakhir yang

cukup menghebohkan yakni penculikan para aktivis demokrasi menjelang kejatuhan Jenderal Suharto pada Mei 1998. Bahkan kasus ini masih menyisakan perkara yang belum tuntas serta raibnya 13 aktivis termasuk penyair Wiji Thukul sampai saat ini. Dalam “Lacak Senin” dengan tajuk ‘Penculikan Sutedja, Gubernur Bali’, pada 27 September 2004 jam 22.00 yang lalu TransTV telah menayangkan acara tersebut.

Beruntung bahwa para narasumber adalah orang-orang terdekat (almarhum) Sutedja, yakni isteri dan anak-anak beliau yang pada saat terakhir tinggal bersama, dengan demikian bisa didapatkan gambaran yang sedikit banyak cukup jelas tentang proses penangkapan atau penculikan itu. Bahwa pada suatu hari dalam tahun 1966 Gubernur Bali Sutedja dipanggil ke Jakarta oleh Presiden Sukarno, antara lain karena keselamatannya ketika itu terancam di Bali. Dan benar bahwa gerombolan yang kemudian menyerbu rumahnya di Bali akhirnya membunuh sejumlah anggota keluarganya tanpa dapat menemui dirinya. Setelah tinggal selama tiga bulan di Jakarta bersama isteri dan anak-anaknya, dengan diberikan tugas khusus oleh Presiden Sukarno, suatu malam ia diambil oleh sejumlah tentara dengan pakaian seragam, dan sejak itu Sutedja tidak pernah diketahui keberadaannya oleh keluarga sampai saat ini. Pencarian keluarga yang dilakukannya dalam menemui instansi militer yang menangkapnya, tidak menemui hasil apa pun, tidak ada instansi militer yang mengaku telah menangkap (atau lebih tepat menculik) atau dan membunuhnya. Keluarga Sutedja sampai saat ini masih menganggap beliau masih hidup.

Racun Rezim Orba: Komunis dan PKI sah untuk Dibunuh

Hal semacam yang dialami Sutedja terjadi juga terhadap ribuan atau ratusan ribu orang lain, baik terhadap orang sipil maupun non-sipil, anggota PKI dan ormas kiri, Partindo, PNI, Baperki, atau rakyat biasa bukan anggota apa pun. Penculikan Sutedja menjadi fenomenal karena ia seorang Gubernur Bali yang sedang menjabat secara resmi! Berkali-kali keluarga beliau maupun penyiar menyatakan bahwa ia bukan komunis atau anggota PKI, bahkan hal itu dikuatkan oleh surat keterangan resmi yang dikeluarkan DPRD Bali (1980-an?), bahwa Sutedja tidak terlibat dalam G30S/PKI.

Pernyataan bahwa “dia bukan komunis”, “dia bukan anggota PKI” – dan nyatanya memang banyak orang yang tidak masuk organisasi apa pun alias rakyat biasa telah ditangkap dan dipenjarakan bertahun-tahun, diculik dan dibunuh dalam peristiwa G30S 1965, dapat diartikan lain. Jangan-jangan pernyataan itu juga mengandung arti bahwa “karena dia komunis, karena dia anggota PKI atau Gerwani”, maka sah saja untuk dibunuh. Inilah salah satu racun yang telah berhasil disebarkan oleh rezim militer Orba sepanjang 32 tahun kekuasaannya bahkan sampai saat ini, memasuki benak jutaan orang muda dan rakyat Indonesia, bahwa “orang komunis anggota PKI, Gerwani dst pada saat itu” memang layak dibunuh. Tidak aneh jika mereka yang ditangkap dan dibunuh itu sebelum atau sesudahnya telah “di-PKI-kan”. Selama racun ini belum ditawarkan dari benak

berjuta rakyat Indonesia, selama racun ini masih disebarakan terus oleh sejumlah orang yang menamakan dirinya pemimpin dan intelektual, maka rekonsiliasi dalam hubungan dengan peristiwa G30S 1965 baru dalam tataran undang-undang, gagasan, alias teori di atas kertas. Masalahnya pengungkapan kebenaran akan mengalami hambatan psikologis luar biasa. Dalam kenyataan sejarah dan secara sosiologis rekonsiliasi dalam hubungan peristiwa ini merupakan bagian terbesar, terlepas dari kemungkinan apakah para anggota DPR yang terhormat yang telah membahas dan mengesahkan UU KKR berpikir ke sana, atau bahkan sebenarnya tidak sama sekali?

Kasus Menteri Negara Nyoto

Setelah sidang kabinet yang ricuh pada 11 Maret 1966, menurut keterangan keluarganya Nyoto pulang ke rumahnya di Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru dan diculik di jalan. Dalam catatan mantan Menteri Negara Oei Tjoe Tat, sidang kabinet yang terakhir diikuti Nyoto adalah sidang pada 6 November 1965 (Oei Tjoe Tat 1998:176). Pada saat itu ratusan ribu kaum komunis dan pengikut Bung Karno telah dibantai. Masih menurut Oei Tjoe Tat, Nyoto kemudian ditahan di RTM Budi Utomo. Suatu malam beberapa orang berpakaian sipil mendatangi RTM untuk mengambilnya tanpa membawa surat perintah. Terjadi perdebatan dengan Mayor CPM Pariman, komandan RTM. Selanjutnya komandan ini menerima telepon dari suatu tempat, dengan terguncang ia melepaskan Nyoto. Ketika itu, November 1965 Nyoto adalah seorang Menteri Negara. Konon ia dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke kali di antara Jakarta dan Bandung (Oei Tjoe Tat 1998:230). Kelak ada pengakuan dari Jenderal Sumitro tentang pembunuhan Nyoto sebagaimana yang terdapat dalam memoarnya. Dengan entengnya sang jenderal yang ketika itu menjadi pembantu Jenderal Suharto sebagai Asisten Operasi Menpangad, menyatakan sakit hati melihat Nyoto dalam sidang kabinet di Bogor dan memerintahkan kepada anak buahnya khusus untuk memburunya. Tipikal jenderal Orba yang dengan bangga mengakui melakukan pembunuhan terhadap lawan politiknya ketika kekuasaannya sedang berkibar yang mungkin dikiranya akan abadi.

“Nyoto, gembong PKI, pernah saya lihat sewaktu ia ikut dalam Sidang Kabinet di Bogor. Dia kelihatan sangat sombong, kurang ajar terhadap Pak Hidayat, hingga saya memberi tanda dengan sikut kepada Jenderal Moersjid dan berkata: ‘Sjid, *ik krijg hem wel.*’ (Aku akan dapatkan dia). Benar, saya sakit hati melihatnya. Saya perintahkan khusus untuk mengejanya supaya ia terpegang. Selang beberapa waktu ia dikabarkan mati sudah” (Ramadhan 1994:59).

Jenderal Sumitro berbicara dengan sangat enteng. Dalam hubungan ini kita “beruntung” karena dengan demikian Nyoto yang sedang menjabat dalam pemerintahan resmi sebagai Menteri Negara, di samping sebagai Wakil Ketua dan anggota Politbiro CC PKI, jelas-jelas telah diculik dan dibunuh pihak penguasa militer (Jenderal Sumitro) yang diakui oleh pelakunya. Demikian halnya yang terjadi dengan DN Aidit, Menko Wakil Ketua MPRS, di samping sebagai Ketua CC

PKI, sang pembunuh, ketika itu Kolonel AD Yasir Hadibroto, telah mengakuinya dengan agak rinci. Dalam hal Gubernur Bali Sutedja, kita “kurang beruntung” karena tidak ada satu instansi atau pembesar militer yang sudi mengaku menculik dan membunuhnya sampai saat ini!

Doa dan Harapan Bagi Penculik

Melalui tulisan ini saya dengan mewakili diri sendiri berdoa dan berharap para penculik dan pembunuh terhadap Gubernur Bali Sutedja maupun terhadap tokoh-tokoh dan rakyat biasa, baik dalam kasus G30S maupun yang lain, termasuk terhadap penyair Wiji Thukul, sudi mengakuinya untuk diketahui kepastiannya dan dicatat bagi keluarga yang bersangkutan, sebelum maut merenggutmu! Masih ada kesempatan bagi kalian untuk memberikan kesaksian! Apa iya kita juga masih bisa berharap dari kesaksian Jenderal Besar Purnawirawan Suharto?

September Kelabu (1965) dan Gairah 2004

Oleh: Harsutejo

Dalam memperingati dan menelisik peristiwa G30S 1965 alias September Kelabu 1965, di Jakarta telah diadakan sejumlah acara yang pada umumnya dilakukan dan diikuti dengan penuh gairah. Gairah ingin tahu duduk perkara sebenarnya dari generasi muda umumnya serta gairah hendak menelisik lebih lanjut dari sejumlah orang tua yang mengalaminya sendiri. Tentu saja tak ketinggalan gairah dari beberapa orang tua yang rindu akan retorika masa lalu yang umumnya tidak disambut anak muda jaman sekarang. Dalam hal ini anak muda jaman sekarang yang hadir lebih mempunyai perhatian pada menelisik peristiwa yang sebenarnya terjadi, kaitannya dengan keterpurukan Indonesia kini dan bagaimana menyiasati hari depan dalam hubungannya dengan masalah rekonsiliasi.

Dalam acara di Perpustakaan Nasional, Jl Salemba Raya, Jakarta pada 28 September telah diadakan pameran dan bazar, dijual buku-buku seputar 1965 dari korban dan kesaksian korban. Acara ini diselenggarakan oleh Diskusibulanpurnama, Elsam, TruK, Kalyanamitra, LPKP65 Bali, JK6, Forum65 & Oktagon. Dalam kesaksian korban yang disebut ‘Tutur Perempuan’ sejumlah perempuan telah menguraikan pengalaman pelecehan dan kekejaman rezim militer Orba yang dialaminya. Sorenya dilakukan pemutaran film bertajuk ‘Kawan Tiba Senja’ yang berisi wawancara sejumlah korban dan keluarga korban, saksi, pakar,

serta ditunjukkan tempat-tempat pembantaian dan kuburan massal khususnya di Bali, karena film ini memang dibuat oleh LPKP65 Bali dan JK6. Para korban dan keluarganya sejak Pramoedya Ananta Toer, pelukis Joko Pekik, peyair Putu Oka Sukanta, orang-orang biasa sampai Ilham Aidit, putra DN Aidit, wawancara para pakar dari Dr Asvi Warman Adam, Dr John Roosa, sampai Robert Cribb, editor *The Indonesian Killings of 1965-1966, Studies from Java and Bali* (1990) yang telah diterjemahkan pada 2000 beredar terbatas, dan 2003 beredar luas.

Dalam acara sore itu serombongan anak muda paduan suara membukanya dengan lagu yang telah menjadi bagian dari sejarah negeri ini, lagu *Genjer-Genjer*. Tentunya lagu ini baru bagi para anak muda, tetapi amat dikenal oleh para hadirin berambut putih, bahkan menimbulkan suasana penuh haru dan semangat, suasana nostalgia. Sampai penulis berkata pada Bung Putu Oka, “Wah saya kira *Gernjer-Genjer* sudah mati, ternyata masih hidup di dada anak-anak muda itu!” Pembacaan prosa puitis yang menyentuh dalam lampu temaram dilakukan oleh Putu Oka Sukanta hasil karyanya sendiri. Putu Oka kita kenal bukan saja sebagai penyair, tetapi juga sebagai akupunkturis, pelestari tanaman obat dan pengembang kesehatan alami, bahkan aktivis dan pembela hak dan martabat perempuan. Laki-laki ubanan enerjetik ini tetap giat berkarya.

Diskusi buku *Mematahkan Pewarisan Ingatan, Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto* karya Budiawan dengan pengantar Hersri Setiawan. Diskusi ini diberi tema ‘Pers, Propaganda dan Pembunuhan Massal 1965’ dengan pembicara wartawan senior Aristides Katoppo, Dr Eka Wenats, dan Joesoef Isak. Berbicara tentang rekonsiliasi, Joesoef Isak merujuk bahwa kita sering membandingkan masalah dengan apa yang terjadi di Afrika Selatan. Tetapi kita lupa bahwa pihak korban sistim apartheid di Afsel telah memenangkan pemilu demokratis dan memegang kekuasaan. Dengan demikian konsep-konsep demokratis diterapkan dalam rekonsiliasi nasional dan dapat berjalan dengan baik. Sedang di Indonesia setelah jatuhnya Suharto, kemudian serangkaian pemilu, kekuasaan masih tetapa berada di tangan komponen Orde Baru, tidak ada perubahan mendasar apa pun kecuali demokrasi formal.

Dr Eka Wenats dari *Institute for Social and Communications Studies* telah menyoroti peran media massa yang telah berkolusi dengan kekuasaan rezim Orba selama 32 tahun. Ia mempertanyakan benarkah peran pers begitu besarnya dalam mendorong pembunuhan massal yang terjadi pada 1965/1966. Disebutkan bahwa ia sedang melakukan kajian terhadap masalah tersebut. Sedang wartawan senior Aristides Katoppo mengakui adanya “pengabdian” media massa terhadap rezim Orba di antaranya berada dalam berbagai tekanan. Ia mengatakan bahwa kesalahan berada di semua pihak, dalam hubungan ini ia mengingatkan pers kiri dan PKI sebelum 1 Oktober 1965. Yang dimaksudkannya adalah di antaranya seruan-seruan “ganyang kabir dan 7 setan desa”. Di pihak lain kita kenal betul akan fitnah pers Orba yang dipandegani oleh *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*, keduanya di bawah militer AD sejak Oktober 1965 yang luar biasa kotornya, utamanya fitnah terhadap Gerwani. Acara-acara tersebut diikuti dengan penuh gairah oleh ratusan orang muda maupun tua yang memenuhi aula.

Acara lain terjadi pada 30 September sore di arena pameran buku di Convention Centre, Senayan. Dalam acara ini Mayjen (Purn) Samsuddin, anggota Komnas Ham meluncurkan buku *Mengapa G30S/PKI Gagal? (Suatu analisis)*. Dari judulnya sudah bisa kita tebak isinya, tidak ada hal baru kecuali pembahasan kepemimpinan Aidit, juga sejumlah gerakan militer. Suasana hidup karena komentar kritis dan “nakal” moderator Ulin Ni’am Yusron dari AJI. Salim Said (Pengamat Politik) menilai kesimpulan penulis bahwa PKI sebagai pemain tunggal merupakan penyederhanaan masalah yang kompleks itu. Ia ragu apakah Jenderal Suharto juga pemain yang lain sebagai banyak dibicarakan dewasa ini tetapi Salim menilai Suharto memang seorang oportunistik yang menggunakan kesempatan untuk keuntungannya sendiri. Letjen (Purn) Agus Wijoyo lebih menekankan pada masalah rekonsiliasi. Sementara itu Dr Ikrar Nusa Bakti dari Lipi mengemukakan bahwa tuduhan yang sampai saat ini masih dilansir bahwa orang komunis itu atheis, tidak beragama dsb merupakan tuduhan generalisasi yang tidak adil. Ia memberikan contohnya dari kehidupan ayah ibunya yang anggota PKI, dalam kehidupan sehari-harinya mereka menjalankan syariat Islam. Disebutkan olehnya bahwa ayahnya yang komunis itu berujar bahwa ia ingin menjadi Islam yang baik karenanya ia menjadi komunis yang baik. Hal ini mengingatkan kita akan pemimpin SI dan PKI dari jaman penjajahan Belanda yakni Kyai Haji Misbach.

Pada 4 Oktober di ruang Munir, Kontras di Jl Borobudur dilakukan peluncuran buku *Gerakan 30 September 1965, Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo*, kerjasama Tride & PEC & Hasta Mitra. Dr Asvi Warman Adam menunjuk pentingnya penerbitan buku ini yang berasal dari beberapa gelintir mereka yang masih hidup yang ketika peristiwa terjadi berada dalam lingkaran dalam. Dari kesaksian Heru Atmodjo kita mendapatkan gambaran lebih jelas akan peran sebenarnya dari Letkol Untung, Kolonel Latief, Brigjen Suparjo, serta dua orang sipil Syam dan Pono. Buku ini juga sekaligus menangkis “teori” Prof Dr Coen Hotlzapfel yang berkesimpulan bahwa peristiwa G30S merupakan komplotan intelijen militer AU yang dipandegani Heru Atmodjo. Ditunjukkannya dengan jelas sejumlah kesalahan tulisan Holtzapfel, di antaranya ia mencampuradukkan tempat-tempat berbeda seperti Lubang Buaya, Pondokgedede dan Penas sebagai Halim alias Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Seperti kita ketahui kekeliruan fatal itu dibuat oleh sejumlah pakar asing lain seperti Ulf Sundhaussen, Harold Crouch, Antonie CA Dake, John D Legge dan yang lain. Sebenarnyalah penyesatan itu sudah dimulai oleh Mayjen Suharto dalam pidatonya di Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965. Seperti kita ketahui Heru Atmodjo kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Mahmillub binaan Suharto.

Acara di Jakarta ini diikuti oleh sejumlah tokoh tua seperti Ir Setiadi Reksoprodjo, mantan Menteri Listrik dan Ketenagaan, kabinet BK terakhir, dan Omar Dani, mantan Men/Pangau. Lebih separo hadirin yang memenuhi ruang Munir terdiri dari anak muda, mayoritas mahasiswa dan mereka yang telah lulus dari berbagai studi di perguruan tinggi. Acara ini diteruskan di Sala pada 6 Oktober di Hotel Agas yang disambut dengan sangat meriah baik tua maupun muda. Dari Jakarta datang narasumber Heru Atmodjo serta editor buku Garda Sembiring dan Harsono Sutedjo. Hadirin datang bukan saja dari Sala tapi juga dari kota-kota di sekitarnya. Berbagai pertanyaan kritis yang terlontar selama acara menunjukkan

bahwa mereka haus akan informasi baru seputar peristiwa 1965 yang telah menjungkirbalikkan negeri ini serta tindak lanjut dari pengungkapan-pengungkapan tersebut. Acara di Sala ini disponsori oleh LSM setempat, Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) yang di antaranya bergerak dalam pencerahan dan advokasi. Tahun lalu Yaphi telah menerbitkan sebuah buku tentang nasib perempuan dan anak-anak Aceh, *Bara Api di Serambi Mekah*. Anak-anak muda yang penuh semangat itu berkantor di Jl Nangka No.5, Kerten, P.O.Box 161, Surakarta 57143, email yaphinangka@yahoo.com.

Wasiat Jenderal Sarwo Edi

Kepada Menantunya: SBY.

Oleh: Harsutejo

Dalam perjalanan saya ke Sala beberapa hari yang lalu dalam rangka peluncuran buku *Gerakan 30 September 1965, Kesaksian Letkol (Pnb) Heru Atmodjo*, saya telah bertemu sejumlah mantan tapol. Pada kesempatan beramah-tamah ngobrol, terselip kisah yang diceritakan dengan nada serius tanpa maksud bercanda apa pun. Kisah bak dongeng itu saya tangkap sebagai di bawah.

Alkisah ketika Jenderal (Purn) Sarwo Edi Wibowo menjelang akhir hayatnya, konon beliau sempat memanggil sang menantu tercinta yang juga seorang jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono yang dewasa ini populer dengan sebutan SBY. Kisah tentu saja menjadi lebih menarik karena jenderal purnawirawan ini baru saja menjadi presiden terpilih Republik Indonesia dalam pemilu langsung untuk pertama kalinya satu kepala satu suara, konon sangat demokratis. Disebutkan bahwa Sarwo Edi, yang tentunya sebagai seorang tentara telah kenyang asam garam kehidupan keras militer, telah menyatakan penyesalannya karena tindakannya selama peristiwa G30S 1965/1966 telah menyebabkan pembantaian jutaan manusia tidak bersalah, sesuatu yang tidak dapat ditebusnya lagi. Beliau merasa ditipu oleh Jenderal Suharto. Dengan takzim maka sang menantu menyambut dan menghiburnya, bahwa dialah yang akan melakukan sesuatu guna menebusnya. Maka sang mertua pun pergi dengan tenang.....

Demikianlah apakah kisah itu sebuah dongeng, mimpi, ilusi atau fakta, wallahualam bissawab. Yang saya tahu sementara mantan tapol dan keluarganya (seberapa banyak saya tidak punya angkanya) telah mendukung dan memilih Sby dalam pemilu yang lalu setelah mengalami kecewa berat terhadap Presiden Megawati Sukarnoputri. Konon seluruh tapol dan korban Orba dari 1965/1966 serta keluarganya meliputi 20 juta orang. Selanjutnya para mantan tapol pendukung tersebut mempunyai harapan besar terhadap presiden terpilih yang sering dikemukakannya dengan malu-malu. Berharap tentu saja positif dan sah,

meskipun kebalikannya dalam konteks pemerintah baru juga mempunyai tempatnya dengan alasannya sendiri. Saya berdoa mudah-mudahan para pemimpi dan pengidap ilusi menjadi cukup realistis hingga tidak perlu kecewa berat, dan kepada semua saya berharap terus dapat berbuat sesuatu (kata 'berjuang' bagi saya pribadi terlalu tinggi) sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk kemaslahatan orang banyak.

Bekasi, 14 Oktober 2004.

Minta Maaf Pada Suharto? Atau Logika Jungkirbalik?

Oleh: Harsutejo

Latar Belakang Sejarah

Belakangan ini ketika Suharto, mantan Presiden RI, sedang sakit, segelintir orang menganjurkan agar rakyat Indonesia meminta maaf kepada Suharto, tentunya mumpung dia masih hidup. Marilah kita lakukan sedikit tinjauan sejarah Republik Indonesia kita tercinta ini, apa rakyat memang perlu meminta maaf padanya.

Sebenarnya bangsa Indonesia dalam sejarahnya yang panjang terus-menerus berada dalam proses membentuk diri, lebih nyata lagi pada penutup abad 19 dan awal abad ke 20. Proses pembentukan diri sebagai bangsa ini meningkat tinggi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang dipelopori pemuda-pemuda Mohamad Yamin, Amir Syarifudin, Sartono, Wage Rudolf Supratman dan yang lain yang bersumpah mengaku sebagai Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Selanjutnya memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Sukarno - Hatta.

Menyadari adanya perbedaan-perbedaan di antara bangsa Indonesia dari 5000 pulau yang didiami penduduk (di antara lebih dari 17.000 pulau), ratusan suku bangsa dan ras keturunan dengan ratusan bahasanya, perbedaan adat, kepercayaan dan agama, warna kulit, tingkat kemajuan, latar belakang sejarah, keyakinan politik dan ideologi dsb, maka para *founding fathers* dengan amat bijaksananya menetapkan 'Bhinneka Tunggal Ika' sebagai semboyan negara, yang berada dalam genggamannya erat kaki Garuda Pancasila. Semboyan ini sudah diwariskan oleh kebijakan sang pujangga Majapahit Mpu Tantular dari abad 14. Semboyan kita bukan 'persatuan dan kesatuan' seperti yang didengungkan setiap hari oleh TVRI semasa Orde Baru, semboyan kita adalah 'Bhinneka Tunggal Ika', kita berbeda-beda seperti dalam kenyataannya memang demikian, tetapi kita satu jua, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Indonesia. Kita bersatu dalam penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman. Dan kita

memang perlu bersatu dalam wadah negara Republik Indonesia. Pembentukan diri bangsa ini masih terus-menerus berproses menuju pada integrasi bangsa yang ideal dalam kebinekaan.

Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang kadang sudah berasal dari sejarah yang panjang terutama di masa penjajahan Belanda, juga perbedaan timpang yang timbul karena konsep pembangunan yang justru merusak persatuan dalam kebinekaan. Perbedaan itu bisa berujung pada satu juga yakni menuju integrasi dengan cara yang tepat, jika tidak maka dapat merupakan kendala besar yang berujung pada desintegrasi. Sebagian perbedaan itu bisa merupakan kekayaan besar bangsa ini juga. Para Bapak Bangsa telah memberikan contoh kebijakan bagaimana menyikapi perbedaan itu antara lain dengan rumusan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila yang dapat merupakan kontrak ikatan terhadap seluruh bangsa ini dengan segala perbedaannya.

Orba Merusak Bhinneka Tunggal Ika

Rezim Orba dalam prakteknya mengabaikan realitas kebinekaan. Kesadaran yang diwariskan para Bapak Bangsa ini tidak pernah mendapat perhatian semestinya. Karena perbedaan itu tidak pernah diakui secara nyata, maka tidak dikelola secara wajar dan menimbulkan bom waktu pertentangan keras terbuka di antara suku, daerah, golongan bahkan dengan nuansa agama. Rezim Orba dengan riuh-rendah selalu menghujat kaum komunis karena antara lain dalam ideologinya menganut prinsip perjuangan kelas yang memecah belah. Selama rezim Orba berkuasa, justru secara sistimatis dan terus-menerus dilakukan politik pecah belah terhadap rakyat Indonesia. Perbedaan dan pertentangan antar-golongan dan suku sebagai bagian dari keanekaragaman bagaimana pun merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia. Persoalannya bagaimana perbedaan dan pertentangan itu dikelola dengan memperkuat institusi masyarakat yang ada, agar masyarakat dapat mengatasi dan menyelesaikannya sendiri tanpa intervensi negara dalam proses yang damai. Yang dilakukan rezim ini justru kebalikannya, melumpuhkan institusi masyarakat dan memperkuat institusi negara dan menjadi negara otoriter, menindas pertentangan dan perbedaan dengan kekerasan. Yang terjadi adalah pertentangan yang membesar seperti api dalam sekam, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Dan inilah yang terjadi setelah tumbanganya Suharto, Sang Bapak Pembangunan..

Di samping itu rezim Orba melakukan berbagai diskriminasi, bukan saja terhadap etnik Tionghoa dan kaum “tidak bersih diri dan tidak bersih lingkungan” korban tragedi 1965, tetapi juga di antara suku-suku pendatang transmigran dan suku setempat, mengabaikan berbagai hak adat, juga dalam hubungannya dengan pembukaan apa yang mereka sebut sebagai proyek pembangunan. Akibatnya pertentangan etnik juga meningkat, sekaligus memperlemah rasa kebangsaan dan mempertebal rasa kedaerahan, timbulnya separatisme yang mengarah pada desintegrasi bangsa. Diperkuatnya institusi negara telah menjurus pada penggunaan teror terhadap berbagai macam kelompok yang berbeda termasuk

kelompok agama yang hendak mengatur lingkungannya sendiri sebagai bagian dari pemberdayaan institusi masyarakat. Pemaksaan institusi negara yang terjadi telah mengambil korban seperti dalam peristiwa Tanjungpriok, Lampung dsb. Teror semacam itu justru telah meningkatkan berkembangnya wawasan agama yang sempit. Terorisme oleh negara yang dimulai secara besar-besaran pada 1965 itu berlanjut di daerah-daerah Papua, Aceh, dan Timor Leste semasa dicaplok rezim Orde Baru, kemudian terpaksa ditinggalkan.

Mesin kekuasaan Orba pun telah jauh mengintervensi partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang independen. Perpecahan yang terjadi digunakan oleh mesin negara yang kental dengan intelijen militer untuk mengontrol dan menguasainya dengan cara mendudukkan orang-orang yang dapat dikendalikan oleh kekuasaan meskipun tidak disukai oleh anggotanya. Jenderal Suharto merupakan jawara dalam melaksanakan politik pecah belah alias *divide et empera* model penjajah. "*Suharto was by now well versed in the tactics of divide and conquer*" (Suharto sangat trampil dalam taktik memecah belah dan menguasai) begitu tulis wartawan terkenal Adam Schwarz pada 1994 yang selama kekuasaan Orba dicekal.

Rezim Orba menghendaki segalanya seragam dengan mengabaikan adanya perbedaan bahkan membunuh perbedaan dengan segala macam rekayasa yang menipu, agar dengan mudah rakyat yang berbeda-beda itu diperintah dan tunduk di bawah kaki kekuasaannya yang seragam pula, kekuasaan yang korup dan represif dengan filosofi 'bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi rejeki' di antara Presiden Suharto, para jenderal (AD khususnya) serta kroni-kroninya. Dengan demikian masyarakat tidak dididik untuk menerima dan menghargai adanya perbedaan dan keberagaman, tidak dididik untuk bekerjasama dalam perbedaan. Rezim Orba telah menafikan motto dasar bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, salah satu mutiara yang telah dihasilkan oleh pendiri negara ini, para Bapak Bangsa. Betapa hebat kerusakan yang dialami negeri dan bangsa ini karena ulah rezim Orba yang dipandegani oleh Jenderal Besar (Purn) Suharto selama 32 tahun, belum lagi kerusakan moral yang begitu luas oleh budaya korupsi yang amat destruktif. Kerusakan semacam itulah yang kita warisi dewasa ini, sampai-sampai negeri ini berada di bibir kebangkrutan. Apa patut rakyat Indonesia yang telah dibuat sengsara ini justru meminta maaf kepada Suharto, seperti yang disarankan segelintir orang? Ini benar-benar logika jungkirbalik bukan?

Bekasi, Mei 2005.-